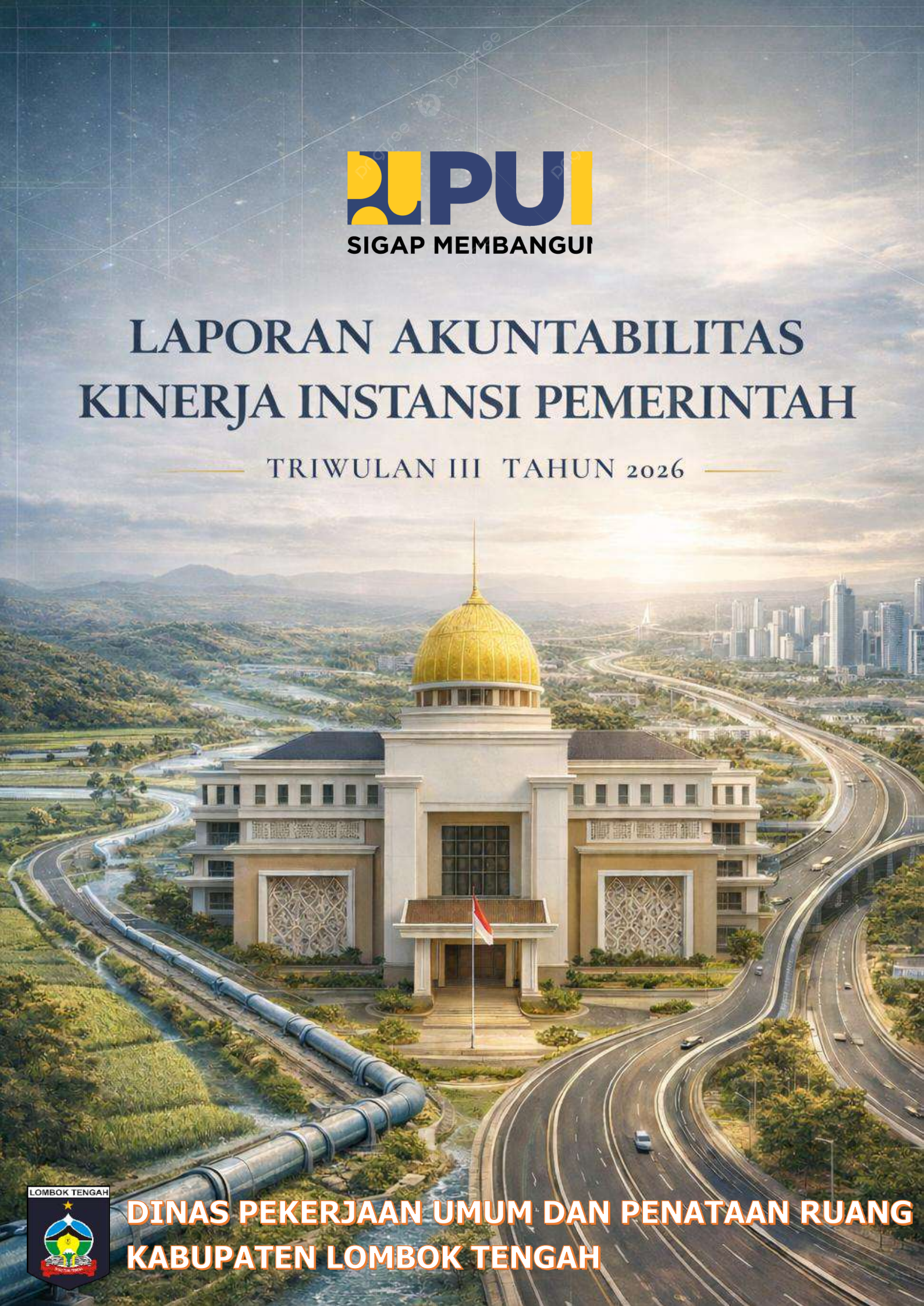
SIGAP MEMBANGUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN III TAHUN 2026



LOMBOK TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Amma ba'du.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Triwulan III Tahun 2026 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat perihal capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam lingkup Triwulan III (Juli s.d. September 2026) Tahun 2026. Laporan triwulanan ini juga menjadi sarana pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga langkah perbaikan dapat diambil lebih dini. Sebagaimana arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami.

"...perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami."

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan

realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Triwulan III Tahun 2026. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, 4 Oktober 2026
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PU dan PENATAAN RUANG

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB I
PENDAHULUAN



I.1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:

THE MANDALIKA
Arita Lombok

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): UPTD Peralatan dan Pengujian, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan UPTD Jasa Konstruksi.

I.1.4 Tugas dan Fungsi

I.1.4.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.1.4.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;
h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;
i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyrakat dan perlengkapan;
c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
d. Pelaksanaan koordinasi peyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);

THE MANDALIKA
Arita Lombok

l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;
p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;
d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;

THE MANDALIKA
Arita Lombok

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;
j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;
k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;
m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.1.4.6 Bidang Bina Marga

A. Tugas

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;

c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

I.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;
h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

I.1.4.8 Bidang Penataan Ruang

A. Fungsi

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

THE MANDALIKA
Arita Lombok

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): UPTD Peralatan dan Pengujian, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan UPTD Jasa Konstruksi.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

I.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.2 DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Agustus 2025, yang merupakan data terakhir tersedia pada penyusunan laporan ini, sebanyak 185 orang. Data perlu dimutakhirkan ke posisi 30 September 2026 karena target PK 2026 untuk penerima gaji dan tunjangan ASN (117 orang/bulan) berbeda dari jumlah pada register, dan PK 2026 mencantumkan Sekretaris Dinas selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga sedangkan register mencatat Kepala Bidang Bina Marga. Secara rinci data PNS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06-09-2021	S2	Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan
2	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	IV/b	01-10-2023	Sekretaris Dinas	12-05-2023	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah
3	JALALUDIN, S.T., MT	IV/a	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021	S2	Magister Teknik Sipil
4	ZULKIPLI, ST. MT.	IV/a	01-04-2023	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S.2	Teknik Pengairan
5	MUNAWARDI, ST.MT	IV/a	01-04-2024	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020	S2	Teknik Sipil
6	AMIR HAMZAH, S.T.	III/d	01-10-2011	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Mesin
7	NURUL CHAERANI, S.T.	III/d	01-04-2012	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Pengairan
8	SURAJE, ST.	III/d	01-10-2016	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Tehnik Sipil
9	LALU AHADI, S.Sos.	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara
10	MUHAMAD NASRI, ST.	III/d	01-04-2019	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021	S1	Teknik Arsitek
11	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	III/d	01-04-2020	Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton	01-02-2024	S1	Teknik Sipil
12	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST	III/d	01-04-2021	Kepala UPT. Air Limbah Domestik	03-05-2024	S1	Teknik Sipil
13	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	III/d	01-04-2021	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021	S.2	Perencanaan Kota dan Daerah
14	AHMAD HALIFI, SE.	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Air Limbah Domestik	20-03-2024	S1	Ekonomi Pembangunan
15	ARIFUDIN NUR, ST. MSc	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021	S2	Magister Sistem & Teknik Transportasi
16	MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT	III/d	01-04-2022	Kabid Bina Marga	07-01-2020	S2	Teknik Sipil
17	IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Cipta Karya	03-05-2024	S2	Pembangunan Wilayah dan Kota
18	EKO HANDI HANDOYO, S.T.	III/d	01-04-2022	Kepala UPT. Peralatan dan Pengujian	07-01-2020	S1	Teknik Mesin
19	LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.P.W.K	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Penataan Ruang	03-05-2024	S2	Teknik Pemb. Wil & Kota

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
20	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak	III/d	01-04-2022	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	03-05-2024	S2	Akuntansi Pemerintahan
21	TODY AULIYA, S.T.	III/d	01-04-2022	Perencana Ahli Pertama	01-02-2024	S1	Teknik Perenc. Wil & Kota
22	R. DWIONO EKO PRASETYO, ST.	III/d	01-04-2023	Analis Sumber Daya Air	07-01-2020	S1	Teknik Sipil
23	BAIQ ERNAWATI, SE.	III/c	01-10-2021	Kasubag TU UPT. Jasa Konstruksi	03-05-2024	S1	Ekonomi Pembangunan
24	BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.	III/c	01-10-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
25	PAIMAN, S.Adm	III/c	01-04-2022	Pengolah Sarana dan Prasrana Pengairan Jonggat)		S1	Ilmu Adm. Negara
26	BUDIMAN, ST	III/c	01-04-2024	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
27	MUSTIAJI	III/b	01-04-2012	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Otomotif
28	BAIQ FITRIAH	III/b	01-04-2015	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
29	LALU AZIS FARHAN	III/b	01-04-2018	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan
30	LALU ANDI AHMAD SUPRIADI	III/b	01-04-2018	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	30-12-2021	SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
31	KASPUL HADI, S. Adm.	III/b	01-10-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan		S1	Ilmu Adm. Negara
32	SRI SURIANTINI, ST.	III/b	01-10-2020	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan		S1	Teknik Mesin
33	LALU RAHMAN	III/b	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
34	HENDRAWAN SOEKRATES	III/b	01-04-2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu	01-01-2024	STM	Bangunan
35	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	III/b	01-04-2022	Bendahara/Bendahara Pengeluaran		S1	Ekonomi Pembangunan
36	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	III/b	01-04-2021	Pengelola DAta		D. III	Teknik Mesin
37	LALU ARYA SUGITA, ST	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan		S1	Teknik Sipil
38	SATRIAWANGSA , S.AP	III/b	01-04-2021	Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian		S1	Ilmu Adm. Negara
39	KAMIL, SH	III/b	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wil. Janapria)		S1	Ilmu-Ilmu Sosial
40	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	III/b	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		S1	IPS
41	MAHENDRA SUGANDHI, ST	III/b	01-04-2023	Pengawas Jaringaan Utilitas		S1	Teknik Sipil
42	MAYA GITA PERTIWI, ST	III/b	01-04-2023	Analis Tata Ruang		S1	Teknik Sipil
43	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	III/b	01-10-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		S1	Bahasa
44	FATIMATUZZAHRAH, SE	III/b	01-04-2024	Pengelola Administrasi Keuangan		SMK	Akuntansi
45	BAIQ RUKYATILWATI, SE	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
46	BURHAN, S.Adm	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SPP	Pertanian & Pemb.
47	JAPARUDIN	III/a	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah		SMU	IPS
48	ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002	S1	Perencana Wilayah dan Kota
49	ARIEF MUNANDAR, ST	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002	S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
50	CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K	III/a	01-03-2022	Analis Tata Ruang	01-03-2002	S1	Perencana Wilayah dan Kota
51	LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
52	LALU NATA TRESNA HADI, ST	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002	S1	Arsitektur
53	NASRUL HASBY, ST	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
54	NURMAN EKA PRANATA, ST	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
55	VIVIN NOVITA NINGSIH, ST	III/a	01-03-2022	Pengawas Jalan dan Jembatan	01-03-2002	S1	Teknik Sipil
56	LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm	III/a	01-04-2022	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		S1	Akuntansi
57	BAHARUDIN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
58	SUKAMTO	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang & Batukliang Utara)		SMEA	Perdagangan
59	AWALUDDIN	III/a	01-04-2023	Pemelihara Peralatan		SMA	IPS
60	MANSYUR, S.Adm	III/a	01-04-2023	sekertaris/Ajudan		S1	Ilmu Adm. Negara
61	SAHNAN	III/a	01-04-2023	Pengelola Data		STM	Bangunan
62	LALU MUHAMAD ALI	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		STM	Bangunan
63	NASIP	III/a	01-04-2023	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan
64	KISWARA	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)		STM	Bangunan
65	LALU RAIS ASHARI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS
66	SAPRUN	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya & Jonggat)		STM	Bangunan
67	LALU SYAMSUL ANWAR	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
68	HIRMAYADI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
69	AMRILLAH, ST	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		S1	Teknik Sipil
70	SARII	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai(DI Jonggat)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
71	LALU HIRJAN, ST	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi umum		STM	Bangunan
72	MUHAMAD MULIAMIN	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Tengah)		SMEA	Perkantoran
73	ARJAWI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Mujur II)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
74	SRI HARTINI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
75	SRI ARTATI	III/	01-04-	Bendahara		SMA A.3	IPS

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
		a	2023	Pengeluaran Pembantu			
76	M. HUSNI AMRI	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
77	EVI FEBRIANTY	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
78	LALU AGUS PUTRA	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian		SMU	IPS
79	JASWADI	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wilayah Praya Timur)		SMA	IPS
80	SUARMAN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	IPA
81	EROWAN	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		SMA	IPA
82	JASMUNI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	IPA
83	SYAHRUDDIN	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Barat Daya)		SMA	IPS
84	ALI SADIKIN	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		STM	Bangunan
85	RAHMAT	III/a	01-04-2023	Pengelola Sampel pengujian		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
86	LALU RIZAL AHMADI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
87	SUHERMAN	III/a	01-04-2023	Pengemudi		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
88	SUPARDI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
89	SLAMET SUPARDI	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)		SMA A.3	IPS
90	SUJATMI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Keuangan		SMA A.2	Biologi
91	LALU SAIFUL BAHRI	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
92	MANGKU BUANA SARDI, S.Adm	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate)		S1	Ilmu Adm. Negara
93	BADARUDIN, ST	III/a	01-10-2023	Pengelola Data		S1	Teknik Sipil
94	DITYA EDWIN EKAYANA, S.Sos	III/a	01-10-2023	Pemelihara Jalan		S1	Ilmu Ilmu Sosial
95	SABRI	III/a	01-10-2023	Pengadministrasi Keuangan		SMA	Paket C
96	MAAD ADNAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggung Hulu		MA	Ilmu-Ilmu Agama
97	MUHAMAD JABIR	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum		SMA A.4	Bahasa
98	RAHMAN ABDANI	III/a	01-04-2024	Pengelola Sampel Pengujian		STM	Bangunan
99	MOHAMAD ERWAN	III/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		SMA A.3	IPS
100	AWALUDIN	III/a	01-04-2024	Pengelola Data		STM	Bangunan

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
101	SAMSURIYANI	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
102	LALU PITRAJAYA	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.4	Bahasa
103	LALU ASMAYADI	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
104	LALU MISBAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS
105	LALU RONI SATRIA	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.4	Bahasa
106	JAZARI AHMAD	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS
107	DWI ARIYANTI IWANA	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum		STM	Bangunan
108	LINDA SARI	III/a	01-04-2024	Pengelola Kepegawaian		SMA	IPA
109	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	III/a	01-04-2024	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		SMA A2	Biologi
110	LALU MUJMAN	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		MA	IPS
111	LALU AGUS ADNAN	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat		SMA A.3	IPS
112	LALU ISHAK	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)		SMA A.3	IPS
113	MUHAMAD ANDRIAN	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum		STM	Bangunan
114	MUHAMAD NASIR	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum (Sekretariat)		SLTA UMUM	IPA
115	MUNADI	III/a	01-08-2024	Pengadministrasi Umum		STM	Bangunan
116	SYAMSURRIJAL	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)		MA A.3	IPS
117	DEDY ZULKARNAIN	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
118	LALU TANAURAN	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
119	RUSDI	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SMA A.2	Biologi
120	BAIQ NUR ASIAH	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	IPS
121	LALU FATHUL HIDAYAT	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		SMA	Ilmu-Ilmu Sosial
122	LALU SUYATNO	II/d	01-04-2021	Teknisi Keciptakaryaan		SMK	Bangunan
123	MASKAM	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	sMA
124	RUPLAN	II/d	01-04-2021	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan		MA	IPS
125	SYAFI ' I	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMK	Pariwisata
126	MUHAMAD MANAN	II/d	01-04-2021	Pengeloa Sampel Pengujian		SMEA	Perdagangan
127	FATHUR	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS
128	ABDUL HAPIZ	II/d	01-04-2021	Pemeliharaan Jalan		STM	Bangunan
129	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air		SMU	IPA
130	M. NUR HIDAYAT	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air		SMU	IPS

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
131	INDRA EKAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
132	KURNIATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
133	ROSMAYATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMA A.3	IPS
134	SULISTIANINGSIH	II/d	01-04-2022	Pengolah daftar Gaji		MA	
135	BAIQ SRI ULAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
136	HIDAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
137	BAIQ REHANA	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMEA	Perdagangan
138	BAIQ NILIWATI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		MA	
139	LALU IMAM SUMAWI	II/d	01-04-2022	Pemelihara Jalan		SMU	IPS
140	IDAYANTI	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMU	IPS
141	HIJRIAH	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum		SMK	
142	LALU JUNAEDI	II/d	01-04-2022	Pengelola Sumber Daya Air		SMA A.3	IPS
143	KUSNAWIJAYA	II/d	01-10-2022	Pemelihara JAlan		STM	Bangunan
144	KABUL	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		SMA.A2	Biologi
145	JAHRI	II/c	01-10-2020	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		Paket C	
146	NONOK IRHAM	II/c	01-10-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA.A2	Biologi
147	SUPARDI	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum		Paket C	
148	I KETUT BUDAYA ADNYANA	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air		Paket C	
149	MUHAMAD HAMIRI	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum		MA	Ilmu-Ilmu Agama
150	MUHAMAD PAIZAN	II/c	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2022	SMA	IPS
151	AKHMAD C	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air		Paket B	
152	MAHSUN	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		STM	Bangunan
153	NISPURWADI	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	IPS
154	KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md	II/c	01-03-2022	Pengelola Sumber Daya Air		D-III	Teknik Sipil
155	LALU MUHAMAD ZAELANI	II/c	01-10-2022	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
156	LALU BUDI HERMAWAN	II/c	01-10-2022	Teknisi Gedung/Bangunan		SMA	Ilmu-ilmu Biologi
157	AKHIMUDIN	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMP	
158	LALU SUHAIDI	II/c	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	Ilmu-ilmu Fisik
159	RAMDAN	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)		SMA	Pengetahuan Budaya
160	MINARIM	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
161	KHAIRIL ANWAR	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
162	HAYIN	II/c	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		PAKET C	
163	LALU ZULKIFLI	II/c	01-04-2024	Teknisi Pemeliharaan		SLTP	

No.	NAMA	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	JURUSAN
		Gol	TMT	JABATAN	TMT		
				Sarana dan Prasarana			
164	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	II/c	01-04-2024	Pramu Kebersihan		SLTP	
165	MANSUR BUDIAKA	II/c	01-04-2024	Operator Alat Berat		Paket C	
166	SASIH	II/c	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		Paket C	
167	ABDUL AZIS	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SLTP	
168	AHMAD BADAWI	II/b	01-10-2021	Operator Alat Berat		Paket C	
169	ROMI IRWANTO	II/b	01-04-2021	Penjaga Kantor		SLTP	
170	QORIMAH	II/b	01-04-2024	Pengadministrasi Persuratan		Paket C	
171	WAHYU HIDAYAT	II/b	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMA	
172	MARZUKI	II/a	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		paket C	
173	SAHRI	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat		SD	
174	LALU ISHAK	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SD	
175	I WAYAN PUJIARTA	II/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan		Paket B	
176	MAHISUN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	
177	RAMDAN	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air		SMP	
178	LALU MAKMUN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SMP	
179	JUMAAH	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat		SD	
180	NURIDIN	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	
181	MASRIK	II/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air		SD	
182	LALU ANWAR	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air		SD	
183	AWALUDIN	I/d	01-04-2022	Penjaga Kantor		SD	
184	SUMARDAN	I/c	01-04-2021	Penjaga Kantor		SD	
185	HUSEN	I/c	01-10-2022	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		SD	

Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Agustus 2025; diolah dari Tabel 1.1)

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	JABATAN STRUKTURAL : Kepala Dinas (II.a) Sekretaris Dinas (III.a) Kepala Bidang (III.b) Kepala Sub Bagian Kepala UPT Kasubbag TU UPT	 1 1 4 2 2 3
2.	JABATAN FUNGSIONAL : Perencana Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan Ahli Muda Teknik Pengairan Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Ruang Ahli Muda	 1 1 3 2 2
3.	PANGKAT/GOLONGAN : Pembina (Golongan IV) Penata (Golongan III) Pengatur (Golongan II) Juru (Golongan I)	 5 110 66 4
4.	JENJANG PENDIDIKAN : S3 S2 S1/D.IV D.III SMA sederajat SLTP sederajat SD sederajat	 0 11 39 2 112 11 10

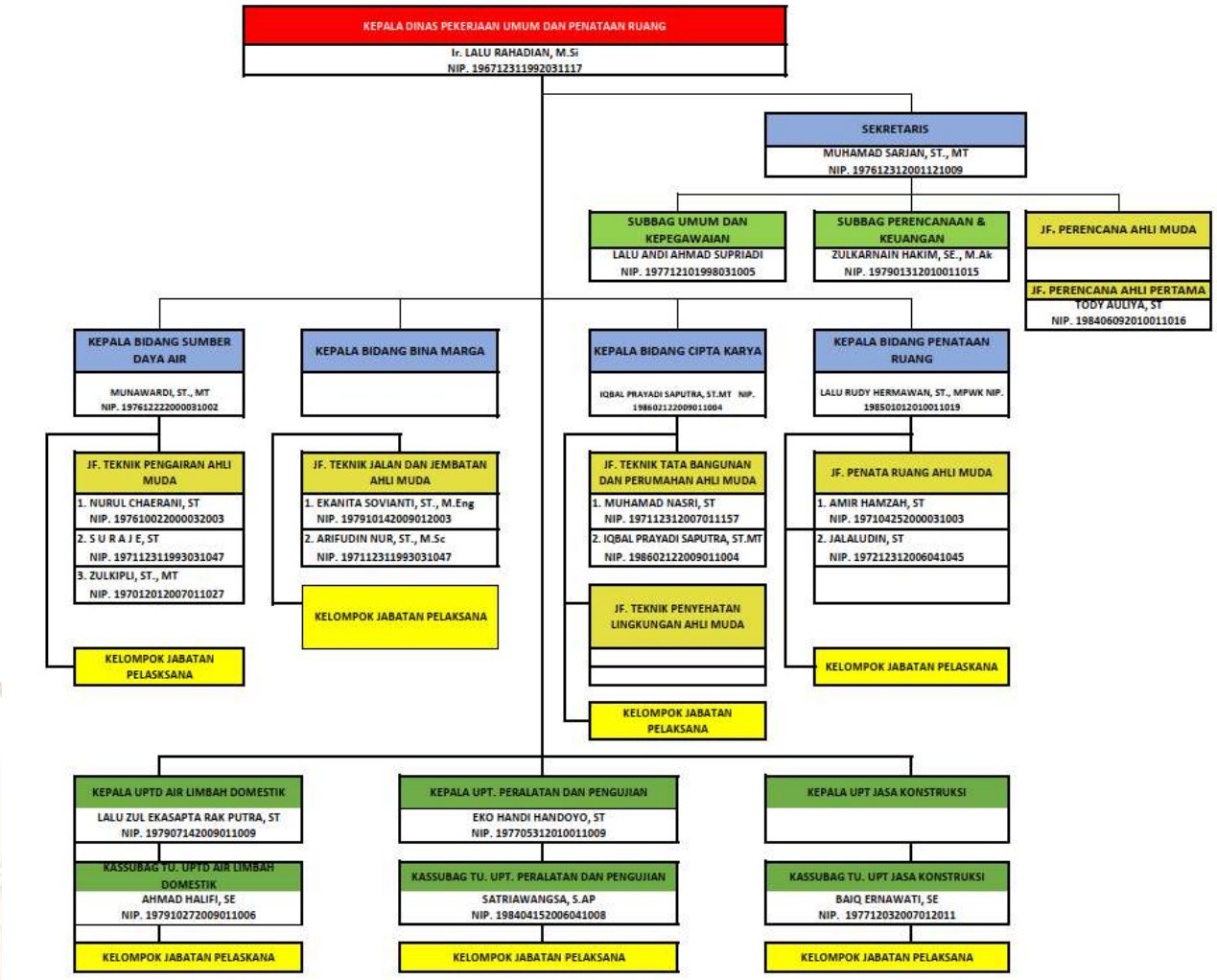
I.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): UPTD Peralatan dan Pengujian, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan UPTD Jasa Konstruksi.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I.4.1 Aspek Strategis

I.4.1.1 Visi

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025) dan Renstra DPUPR Tahun 2025-2030, visi pembangunan daerah adalah “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)”. Melalui Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penataan Ruang, DPUPR berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan serta penataan ruang yang tertib.

I.4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD menetapkan lima misi. DPUPR berkontribusi terutama pada Misi 4 “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah” (Tujuan T.4.1; Sasaran S.4.1.1 dan S.4.1.2) dan pada Misi 2 “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau” (Sasaran S.2.1.1 tentang akuntabilitas kinerja). Misi 4 menekankan peningkatan kualitas jalan dan jembatan penghubung antarwilayah, jaringan irigasi, air minum dan sanitasi aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Keterkaitannya dengan Renstra DPUPR disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Keterkaitan Misi dan Sasaran RPJMD 2025-2029 dengan Renstra DPUPR

Misi RPJMD	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD (target 2026)	Renstra DPUPR
Misi 4	T.4.1 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah Secara Seimbang dan Berkelanjutan	IKLI 58,98 (Tabel 3.4 RPJMD)	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas (IKLI)
Misi 4	S.4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur 58,55; Rasio Konektivitas 42,80	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur (Indeks Infrastruktur)
Misi 4	S.4.1.2 Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	RT akses air minum layak 95,81%; RT akses sanitasi aman 4,47%	S.1.1 melalui Program SPAM dan Air Limbah
Misi 4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (kualitas penyelenggaraan penataan ruang)	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang 100%	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan
Misi 2	S.2.1.1 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah 77,06	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja (SAKIP Perangkat Daerah 73,04 pada PK)

Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029; PK Tahun 2026 Revisi 1; Bab II Tabel 2.18.

I.4.1.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, program prioritas yang menjadi tanggung jawab DPUPR pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (kode 1.03) berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut. Pada PK Tahun 2026, program nomor 5, 6, dan 8 tidak dianggarkan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

I.4.2 Isu Strategis Utama

Isu strategis daerah pada RPJMD 2025-2029 yang terkait DPUPR adalah IS2 (Kualitas Infrastruktur) dan IS6 (Peningkatan Tata Kelola). Isu strategis bidang berdasarkan Renja DPUPR disajikan pada Tabel 1.4 dan diperbarui dengan permasalahan pelaksanaan sampai Triwulan III Tahun 2026 pada Tabel 1.5.

Tabel 1.4 Isu Strategis Utama Bidang dan Pengaruh Perubahan Regulasi

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
Sumber Daya Air (SDA)	- Rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi	- Perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk proyek irigasi. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya air dapat berdampak pada program irigasi di tingkat daerah.
Bina Marga	- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap) - Kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, dan terminal	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembangunan jalan.
Cipta Karya	- Rendahnya cakupan pelayanan air minum - Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah - Masih terdapat rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan - Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk bangunan gedung.
Penataan Ruang	- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang - Belum optimalnya pemanfaatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mengendalikan fungsi tata ruang - Belum optimalnya pemanfaatan lahan, terutama	- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang. Misalnya, perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi mekanisme perizinan dan pengendalian tata ruang.

Bidang	Isu Utama	Pengaruh Perubahan Regulasi
	pada lahan kritis	
Sekretariat dan Umum	- Masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya yang belum optimal	- Perubahan regulasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat mempengaruhi kebijakan internal dan program DPUPR. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional tentang kesetaraan gender dapat berdampak pada program dan kebijakan internal DPUPR untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur.

Sumber: Renja DPUPR (isu strategis bidang) dan data olahan.

Tabel 1.5 Isu Strategis Pelaksanaan Triwulan III Tahun 2026

Bidang	Isu Pelaksanaan sampai Triwulan III 2026	Rujukan Bab III
Bina Marga	Enam paket jembatan dan lima paket aspal berisiko melewati batas kontrak; lima dari 18 ruas rusak berat; material pemeliharaan belum memenuhi standar mutu; Kemantapan Jalan 76,87% (target akhir 81,17%).	Tabel 3.7, 3.9, 3.11
Sumber Daya Air	OP irigasi baru 6,85%; tiga pekerjaan melewati batas 25 September tanpa status; swakelola Rp210 juta dialihkan ke Perubahan; Kondisi Irigasi turun dari 95,12% menjadi 89,53%.	Tabel 3.3, 3.9
Cipta Karya	SPAM Mandalika baru 10%; RISPAM dan DAK belum terkonfirmasi; SPALD terserap 91,69% dengan fisik subkegiatan 11,50%; IPLT tanpa dokumen standar teknis; akses sanitasi aman 3,33% (target 2026 4,47%).	Tabel 3.9, 3.10
Penataan Ruang	RTRW dan RDTR menunggu pembahasan lintas sektor; 38 dari 245 permohonan dikembalikan karena kelengkapan dokumen.	Tabel 3.9, 3.16
Sekretariat dan Perencanaan	Nilai IKU dan indeks tidak berubah selama tiga triwulan; realisasi LS dan Renja berbeda Rp17,67 miliar; fisik tidak konsisten antartingkat; target triwulanan belum ditetapkan; pagu Renja 1,96 kali pagu PK.	Tabel 3.1, 3.14

Sumber: Bab III Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 (data sementara).


THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025) yang memuat tahapan target sampai dengan tahun 2030.[1]

[1] Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

II.1.1 Visi[2]

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025) telah ditetapkan visi pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional dan provinsi. Visi Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)"

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah mendukung visi tersebut terutama melalui penyediaan infrastruktur berkualitas yang merata dan berkelanjutan serta penataan ruang yang tertib. Visi dijabarkan ke dalam lima misi yang memuat tujuan, sasaran, indikator, dan target.

II.1.2 Misi3

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas

Tujuan T.1.1: terwujudnya kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas, sehat dan cerdas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau

Tujuan T.2.1: terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, inovatif dan kolaboratif. Sasaran S.2.1.1 (Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah) diukur dengan Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah, yang menjadi acuan bagi Sasaran S.1.3 Renstra DPUPR.

Misi 3 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan T.3.1: terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat kemiskinan.

[2] RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025) dan Renstra DPUPR Tahun 2025-2030
[3] RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (Perda Nomor 4 Tahun 2025) dan Renstra DPUPR Tahun 2025-2030

Misi 4 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antarwilayah

Tujuan T.4.1: terwujudnya pembangunan infrastruktur antarwilayah secara seimbang dan berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Indeks Desa, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran S.4.1.1 (Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah) diukur dengan Indeks Infrastruktur dan Rasio Konektivitas; Sasaran S.4.1.2 (Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan) mencakup akses air minum dan sanitasi aman.

Misi 5 : Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Tujuan T.5.1: terwujudnya masyarakat yang harmonis, dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, DPUPR mengacu terutama pada Misi 4 (Tujuan T.4.1; Sasaran S.4.1.1 dan S.4.1.2) yang diwujudkan melalui program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (kode 1.03), serta pada Misi 2 (Sasaran S.2.1.1) melalui peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.1.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lombok Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Dinas Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Renstra DPUPR Tahun 2025-2030 menetapkan 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yakni:

Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2030

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET 2026 (PK)
1	2	3	4	6	7	8
T.1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	I.T.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Dokumen perhitungan IKLI	Kepala Dinas	52,68

II.1.3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	SASARAN	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET 2026 (PK)
1	2	3	4	5	6	7
S.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	I.S.1	Indeks Infrastruktur	SK Metodologi Indeks Infrastruktur	Kepala Dinas	60,89
S.1.2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	I.S.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Laporan Kinerja Penataan Ruang	Kepala Dinas	100%
S.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	I.S.3	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP (Inspektorat)	Kepala Dinas	73,04

II.2 RENCANA KERJA/KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahunan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 memuat 11 program pada Urusan

Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (kode 1.03), dengan target outcome yang sama dengan RPJMD dan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan DPUPR Tahun 2026: Program, Indikator Outcome, Target, dan Pagu

No	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Pagu PK 2026	Pagu Indikatif RPJMD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%	Rp22.940.166.863	Rp29.488.306.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota	88,69%	Rp2.755.824.162	Rp7.091.247.000
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RT dengan akses layanan sumber air minum layak	95,81%	Rp4.986.825.000	Rp13.662.195.000
		RT dengan akses air minum SPAM perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	81,32%		
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RT dengan akses air limbah domestik aman	88,93%	Rp2.291.839.610	Rp2.805.129.000
		RT dengan akses sanitasi aman	4,47%		
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan drainase dalam kondisi baik	21,46%	Rp0	Rp1.515.616.000
6	Pengembangan Permukiman	Cakupan infrastruktur permukiman kondisi baik	100%	Rp0	Rp7.113.236.000
7	Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	100%	Rp4.601.326.160	Rp27.105.687.000
		Proporsi fasilitas pemda yang menggunakan EBT	1,51%		
		Persentase kepatuhan PBG dan SLF	100%		
		Konsumsi listrik per kapita	374,69 kWh		
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	100%	Rp0	Rp2.200.000.000
9	Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	76,786%	Rp27.609.777.563	Rp57.757.392.000
10	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	21,57%	Rp33.975.220	Rp101.343.000
11	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	100%	Rp314.723.000	Rp757.300.000
	JUMLAH			Rp65.534.457.578	Rp149.597.451.000

Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 (Program Perangkat Daerah 2026-2030); PK Tahun 2026 Revisi 1; Bab III.

Pagu PK 2026 (delapan program) sebesar Rp65.534.457.578 atau 43,81% dari pagu indikatif RPJMD 2026 untuk Urusan 1.03 (Rp149.597.451.000). Tiga program (Drainase, Permukiman, dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya) memiliki pagu indikatif RPJMD Rp10.828.852.000 tetapi tidak dianggarkan pada PK 2026. Pagu Renja yang digunakan sebagai pembanding pada Bab III adalah Rp128.635.240.462 (1,96 kali pagu PK).

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU), atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan[4].

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (*improvement activities*);
2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

IKU DPUPR Tahun 2026 ditetapkan mengacu pada Renstra DPUPR 2025-2030, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029, dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang pedoman perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu laporan kinerja. IKU juga memperhatikan Catatan Hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Kinerja Tahun 2025 (Februari 2026). IKU DPUPR Tahun 2026 disajikan dalam Lampiran.

II.3.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

Instansi	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Fungsi	:	a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas; c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara; g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Tujuan	:	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator Tujuan	:	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Rincian Indikator Kinerja Tujuan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

[4] Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS/FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks (skala 0–100) kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, antara lain jalan, air minum, dan telekomunikasi. Rumus dan metode pengambilan data mengikuti dokumen perhitungan IKLI (belum dilampirkan; lihat Bab III Tabel 3.1 butir V6).	Dokumen perhitungan IKLI

II.3.2 Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Sasaran DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

Instansi	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Fungsi	:	a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas; b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas; c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara; g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Tujuan	:	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator Tujuan	:	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Sasaran	:	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 2. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Infrastruktur 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 3. Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7 Rincian Indikator Kinerja Sasaran DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS/FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks komposit berbobot atas tujuh komponen: Jalan, Konektivitas, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Internet, dan Listrik, dengan bobot sesuai SK Metodologi Indeks Infrastruktur (antara lain Air Minum 0,27 dan Sanitasi 0,22). Dinilai tahunan dan dibandingkan langsung dengan target (Bab III).	SK Metodologi Indeks Infrastruktur
Meningkatnya Kesesuaian	Persentase Kesesuaian	(Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai RTR ÷ Jumlah total KKPR yang diterbitkan) × 100%.	Laporan Kinerja Penataan Ruang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS/FORMULA	SUMBER DATA
Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Pemanfaatan Ruang	KKPR adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah (skala 0–100) yang ditetapkan secara resmi setiap tahun.	Hasil evaluasi SAKIP (Inspektorat)

II.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014).

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan tahun kedua Renstra DPUPR 2025-2030. PK disusun berjenjang: Kepala Dinas dengan Bupati Lombok Tengah (Eselon II), serta Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD dengan atasan langsungnya. Dokumen yang digunakan dalam laporan ini adalah PK Tahun 2026 Revisi 1 (tertanggal 31 Januari 2026 pada dokumen) dengan total anggaran Rp65.534.457.578 untuk delapan program.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	52,68 (indeks)
2	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	60,89 (poin)
3	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100%
4	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,04 (poin)

Sumber: PK Tahun 2026 Revisi 1 (Kepala Dinas), Lampiran A.

Tabel 2.9 Program dan Anggaran pada PK Kepala Dinas Tahun 2026

No	Program	Anggaran 2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp22.940.166.863
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp2.755.824.162
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp4.986.825.000
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp2.291.839.610

No	Program	Anggaran 2026
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.601.326.160
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp27.609.777.563
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp314.723.000
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp33.975.220
	JUMLAH	Rp65.534.457.578

Sumber: PK Tahun 2026 Revisi 1 (Kepala Dinas), Lampiran B.

II.4.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%

Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas: Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan IKLI.

Anggaran: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp22.940.166.863.

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunannya	1 Dokumen
5	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
6	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
7	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
8	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
9	Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan
10	Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
11	Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan

Anggaran: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp225.302.538; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp15.658.207.091; jumlah Rp15.883.509.629.

Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	2 Laporan
2	Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3	Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
4	Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 Dokumen
5	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
6	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
7	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
8	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit
9	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	8 Unit

Anggaran: Administrasi BMD Rp3.324.900; Administrasi Kepegawaian Rp9.480.000; Administrasi Umum Rp136.879.000; Pengadaan BMD Rp3.630.040.000; Jasa Penunjang Rp2.760.154.080; Pemeliharaan BMD Rp516.779.254; jumlah Rp7.056.657.234.

II.4.2 Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas selaku Penanggung Jawab Bidang Bina Marga Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	76,786%

Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas: Indeks Infrastruktur (komponen jalan).

Anggaran: Program Penyelenggaraan Jalan Rp27.609.777.563.

II.4.3 Perjanjian Kinerja Bidang Sumber Daya Air

Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	88,69%

Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas: Indeks Infrastruktur (komponen irigasi).

Anggaran: Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rp2.755.824.162.

II.4.4 Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Cipta Karya Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Ketahanan Air – RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	95,81%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	RT yang mendapat akses air minum melalui SPAM perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	81,32%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	RT yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	88,93%
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	RT dengan akses sanitasi aman	4,47%
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/Kota	100%
6	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	100%

Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas: Indeks Infrastruktur (komponen air minum, sanitasi, dan bangunan gedung).

Anggaran: SPAM Rp4.986.825.000; Air Limbah Rp2.291.839.610; Penataan Bangunan Gedung Rp4.601.326.160; jumlah Rp11.879.990.770.

II.4.5 Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang

Tabel 2.16 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penataan Ruang Tahun 2026

No	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kab/kota	100%

Kontribusi terhadap IKU Kepala Dinas: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Anggaran: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp314.723.000.

II.4.6 Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Tabel 2.17 Perjanjian Kinerja UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tahun 2026

No	Pejabat	Sasaran / Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target 2026	Anggaran 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	8 Unit	Rp300.950.274
2	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah RT yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja	1.000 RT	Rp10.859.610
3	Kasubbag TU UPTD Jasa Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi operator, teknisi atau analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dilatih	50 Orang	Rp33.975.220
4	Kasubbag TU UPTD Peralatan dan Pengujian	Administrasi ketatausahaan UPTD terlaksana tertib	Persentase rencana hasil kerja selesai tepat waktu dan sesuai standar (*)	100% (*)	Dikelola pimpinan unit
5	Kasubbag TU UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sarana pengangkutan lumpur tinja tersedia dan siap operasional	Persentase rencana hasil kerja selesai tepat waktu dan sesuai standar (*)	100% (*)	Dikelola pimpinan unit

(*) Indikator usulan penyusun PK karena tidak tersedia target individual pada Renja/Renstra. Jabatan Kepala UPTD Jasa Konstruksi tidak terisi sehingga PK ditandatangani Kasubbag TU dengan Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

II.5 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT (Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.

1. Rencana Strategis (Renstra)
   a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan (biasanya dalam rentang 3-5 tahun).
   b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
   a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya untuk satu tahun tertentu.
   b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.
3. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.
b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka panjang yang terdapat dalam Renstra.

Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubungkan oleh pola sebagai berikut.

a. Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.
b. RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.

Keselarasan antara RPJMD 2025-2029, Renstra, PK Tahun 2026, dan Laporan Kinerja (Bab III) diperiksa pada dua tingkat berikut. Pertama, target Indikator Kinerja Utama pada Tabel 2.18. Kedua, target indikator outcome program pada Tabel 2.19.

Tabel 2.18 Keselarasan Target Indikator Kinerja Utama antara RPJMD, PK 2026, dan Dasar Penilaian Bab III

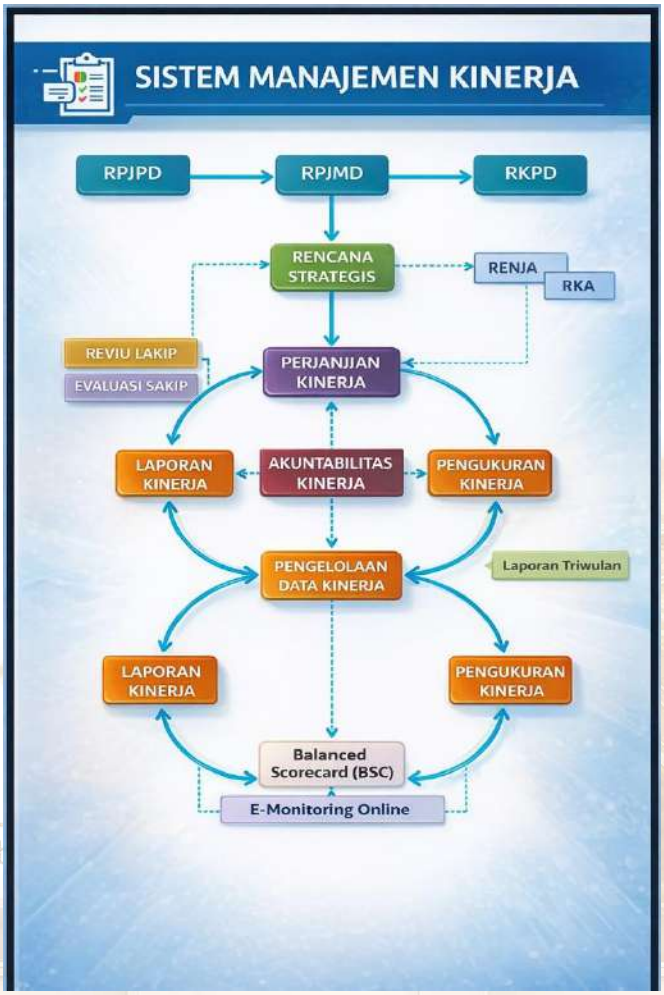
Indikator	RPJMD 2025-2029 (2026 / 2030)	PK 2026 Rev.1	Dasar penilaian Bab III (2026 / 2030)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IKLI (T.1)	58,98 / 70,03 (Tabel 3.4); 80,58 / 88,58 (Tabel 4.2)	52,68	53,91 / 64,76	Selisih target Bab III terhadap PK +1,23; RPJMD memuat dua seri berbeda.
Indeks Infrastruktur (S.1.1)	58,55 / 69,46	60,89	63,33 / 74,28 (SK Metodologi)	Selisih target Bab III terhadap PK +2,44; seri SK berbeda dari RPJMD.
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (S.1.2)	Tidak ada IKU setara; outcome program kasus pelanggaran 100%	100%	100 / 100	Selaras.
Nilai Implementasi SAKIP (S.1.3)	77,06 / 85,91 (SAKIP Pemerintah Daerah)	73,04	73,04 / 80,12	Target PD sama dengan PK; RPJMD berlaku untuk tingkat Pemda.

Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029; PK Tahun 2026 Revisi 1; Bab III Tabel 3.2 dan 3.7.

Tabel 2.19 Keselarasan Target Indikator Outcome Program: RPJMD, PK 2026, dan Bab III

Program	Indikator Outcome	RPJMD 2026	PK 2026	Bab III 2026	RPJMD 2030	Keterangan
Penunjang	Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	Selaras
SDA	Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	88,69	88,69	88,69	100	Selaras
SPAM	RT akses air minum layak (%)	95,81	95,81	95,81	98,93	Selaras
SPAM	RT akses SPAM terlindungi (%)	81,32	81,32	81,32	84,24	Selaras
Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,93	88,93	88,93	91,93	Selaras
Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	4,47	4,47	4,47	12,52	Selaras
Drainase	Cakupan drainase kondisi baik (%)	21,46	–	21,46	23,15	Tidak ada pada PK (program tanpa pagu 2026)
Permukiman	Cakupan infrastruktur permukiman kondisi baik (%)	100	–	100	100	Tidak ada pada PK (program tanpa pagu 2026)
Gedung	Bangunan gedung kondisi baik (%)	100	100	100	100	Selaras
Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	1,51	–	1,51	6,26	Tidak ada pada PK
Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100	100	100	100	Selaras
Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	374,69	–	374,69	435,17	Tidak ada pada PK
Penataan B&L	Penataan bangunan dan lingkungan (%)	100	–	100	100	Tidak ada pada PK (program tanpa pagu 2026)
Jalan	Tingkat kemantapan jalan (%)	76,786	76,786	76,79	81,166	Selaras (pembulatan)
Jasa Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi ahli (%)	21,57	–	21,57	25,25	PK hanya memuat 50 orang dilatih
Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	100	100	100	100	Selaras

Sumber: RPJMD 2025-2029 (Program Perangkat Daerah 2026-2030); PK Tahun 2026 Revisi 1; Bab III Tabel 3.3 dan 3.7.



Gambar 2.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Bab ini menyajikan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah untuk Triwulan III (Juli–September) 2026 dan capaian kumulatif sampai Triwulan III.

Sumber data. (1) Rekapitulasi realisasi anggaran DPUPR 2026 (berkas LS, per bidang, program, dan subkegiatan; dokumen dibuat 13 Oktober 2026) sebagai sumber realisasi keuangan dan fisik Triwulan III. (2) Cetakan Evaluasi RENJA SKPD untuk realisasi Triwulan I–II dan IKU/outcome; kolom Triwulan III pada Renja hanya terisi sebagian. (3) Anggaran riil: PK 2026 Rev.1 (pagu per program dan, melalui berkas LS, per subkegiatan), dengan pagu Renja sebagai pembanding. (4) Target IKU: SK Metodologi (Indeks Infrastruktur), PK, dan Renstra. (5) Laporan Monev (Rakor 7 September dan evaluasi 6 Oktober 2026) serta matriks faktor pendorong dan penghambat sebagai sumber faktor Triwulan III. Data yang belum tersedia tidak dianalisis.

III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Capaian dihitung dengan Capaian = Realisasi ÷ Target × 100% untuk indikator yang semakin tinggi semakin baik. IKU berupa indeks atau persentase level sehingga dibandingkan langsung dengan target tahunan. Kategori memakai skala Perbup 84/2024: ≤50% Sangat Rendah; 51–65% Rendah; 66–75% Sedang; 76–90% Tinggi; >91% Sangat Tinggi. Evaluasi Triwulan III berfungsi sebagai pengendalian dini menjelang triwulan penutup: apakah anggaran yang telah dikontrakkan dan dibayarkan menghasilkan keluaran dan hasil yang mendukung target tahunan.

III.1.1 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Triwulan III Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	Capaian thd Target Triwulan III	Capaian thd Target Tahunan	Status Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	IKLI (I.T.1)	Indeks (0–100)	53,91	Tidak ditetapkan terpisah	65,70	121,87%	121,87%	Sangat Tinggi; tidak berubah sejak Tw I; basis hitung perlu dipastikan	Tabel IKU Tw III; PK; SK
2	S.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (I.S.1)	Poin (0–100)	63,33 (SK)	Tidak ditetapkan terpisah	61,89	97,73%	97,73%	Sangat Tinggi menurut skala, tetapi kurang 1,44 poin dari target 2026; tidak berubah. Seri PK/Renstra (58,55): 105,70%	Tabel IKU Tw III; SK
3	S.1.2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (I.S.2)	%	100	Tidak ditetapkan terpisah	100	100%	100%	Sangat Tinggi; stabil	Tabel IKU Tw III; PK
4	S.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP PD (I.S.3)	Poin (0–100)	73,04	Tidak ditetapkan terpisah	72	98,58%	98,58%	Sangat Tinggi menurut skala, tetapi kurang 1,04 poin dari target 2026; tidak berubah	Tabel IKU Tw III; PK

Rumus: Capaian = Realisasi Tw III ÷ Target 2026 × 100%. Target triwulanan tidak ditetapkan terpisah.

Arita Lombok

Perkembangan IKU. Keempat IKU tidak berubah selama tiga triwulan. Untuk SAKIP hal ini wajar karena nilainya hasil evaluasi resmi tahunan. Untuk IKLI dan Indeks Infrastruktur, ketidakberubahan terjadi ketika kemajuan fisik pada berkas LS sudah tinggi (Bina Marga 80%, SDA 100%, Cipta Karya 70%) dan serapan 68,68% dari pagu PK. Artinya nilai indeks belum merekam hasil pelaksanaan Triwulan I–III. Ini bukan bukti bahwa program tidak berkontribusi, melainkan bahwa pengukuran indeks belum diperbarui dari data komponen terbaru; dugaan ini perlu dikonfirmasi pengelola data.

Komponen Indeks Infrastruktur. Menurut bobot SK, kenaikan rencana 2026 berasal dari Konektivitas (±43%), Irigasi (±24%), Air Minum, Sanitasi, Jalan, dan Internet. Pada Triwulan III kemajuan fisik terbesar justru ada pada komponen Jalan dan Irigasi (bobot kecil dan sedang), sedangkan Konektivitas, Internet, dan Listrik tetap tanpa indikator pada PK bidang. Dengan demikian kemajuan fisik yang tinggi tidak otomatis memenuhi kenaikan rencana indeks.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Realisasi tetap 100%. Layanan KKPR pada Renja 32 pada Triwulan III (kumulatif 256 dari target 300, 85,33%). Monev Triwulan III mencatat 44 PKKPR dan 75 informasi ruang, pengendalian ruang melampaui target dengan 2 SP1 dan 4 SP2, tetapi 38 dari 245 permohonan dikembalikan karena kelengkapan dokumen belum memenuhi standar.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.2 Capaian Indikator Outcome Program (Realisasi Terakhir Tersedia: Triwulan II)

No.	Program	Indikator Outcome	Target 2026	Realisasi 2025	Realisasi Terakhir (Tw II)	Capaian thd Target 2026	Status Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	50,00	50,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai	Nilai Tw II; Tw III belum dilaporkan.
2	Program SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%)	88,69	95,12	89,53	100,95%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
3	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%)	95,81	97,09	97,09	101,34%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
4	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	81,32	80,59	80,59	99,10%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
5	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,93	88,18	88,18	99,16%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
6	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	4,47	3,10	3,33	74,50%	Sedang (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
7	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	21,46	20,15	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Tidak ada data; program tidak beranggaran 2026 (PK) atau tanpa pengukuran.
8	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	100,00	97,00	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Tidak ada data; program tidak beranggaran 2026 (PK) atau tanpa pengukuran.
9	Program Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	374,69	284,75	284,75	76,00%	Sedang (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja. PK: di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya.
10	Program Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	85,91	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
11	Program Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	1,51	0,70	0,70	46,36%	Sangat Rendah (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja. PK: di luar kendali langsung Bidang Cipta Karya.
12	Program Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
13	Program Penataan B&L	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
14	Program Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,79	76,88	76,87	100,11%	Sangat Tinggi (nilai Tw II)	Tw III belum dilaporkan pada Renja.
15	Program Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	21,57	20,90	0,00	Belum dapat dihitung	Belum ada data	Tidak ada data; program tidak beranggaran 2026 (PK) atau tanpa pengukuran.
16	Program Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	100,00	100,00	50,00	50,00%	Kemajuan kumulatif; belum dapat dinilai	Nilai Tw II; Tw III belum dilaporkan.

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (kolom Triwulan III kosong untuk indikator outcome).

Indikator outcome Triwulan III belum dilaporkan pada Renja sehingga nilai terakhir (Triwulan II) dipertahankan dan tidak diperlakukan sebagai capaian Triwulan III. Status indikator tidak dapat diperbarui sampai data tersedia.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran, Kontrak, dan Fisik per Bidang (LS, Sementara)

No.	Bidang	Anggaran (Paket)	Kontrak	Kontrak ÷ Anggaran	Nilai Realisasi	Realisasi ÷ Kontrak	Saldo	Keuangan	Fisik	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bina Marga (BM)	Rp27.011.236.348	Rp25.521.261.000	94,5%	Rp18.158.608.850	71,2%	Rp7.362.652.150	67%	80%	+13
2	Cipta Karya (CK)	Rp15.429.656.160	Rp11.648.575.000	75,5%	Rp9.161.582.049	78,6%	Rp2.486.992.951	59%	70%	+11
3	Sumber Daya Air (SDA)	Rp2.450.975.500	Rp2.426.065.000	99,0%	Rp2.401.818.000	99,0%	Rp24.247.000	98%	100%	+2
4	Sekretariat (SEK)	Rp480.610.050	Rp343.803.853	71,5%	Rp343.803.853	100,0%	Rp0	72%	70%	-2
	Total	Rp45.372.478.058	Rp39.939.704.853	88,0%	Rp30.065.812.752	75,3%	Rp9.873.892.101	66%	–	–

Sumber: Rekapitulasi realisasi anggaran per bidang, berkas LS DPUPR 2026 (sementara). Persentase kontrak dan realisasi dihitung penyusun.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Sebesar 88,0% anggaran paket telah dikontrakkan dan 75,3% nilai kontrak telah dibayarkan. Fisik mendahului keuangan pada Bina Marga (+13 poin) dan Cipta Karya (+11 poin), yang wajar bila pembayaran mengikuti termin. SDA hampir selesai (fisik 100%, keuangan 98%). Sisa saldo kontrak Rp9,87 miliar terkonsentrasi pada Bina Marga (Rp7,36 miliar) dan Cipta Karya (Rp2,49 miliar), yang menjadi beban pengendalian triwulan penutup.

III.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Periode Sebelumnya

Pembanding yang tersedia: Triwulan I–II 2026, baseline 2024–2025, dan data keuangan kumulatif. Data Triwulan III 2025 dan 2021–2023 tidak tersedia; set indikator 2026 berbeda dari laporan 2025 sehingga angka Bab III 2025 tidak dibandingkan.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi IKU Triwulan I–III 2026 dengan 2024 dan 2025

Indikator	2024	2025	Tw I	Tw II	Tw III	Δ Tw II→III	Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
IKLI	51,65	52,68	65,70	65,70	65,70	0,00	Tidak berubah selama tiga triwulan
Indeks Infrastruktur (basis SK)	–	60,89	61,89	61,89	61,89	0,00	Tidak berubah; +1,00 dari baseline SK
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	100	100	100	0,00	Stabil pada target
Nilai Implementasi SAKIP	66,84	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	Nilai resmi tahunan

Sumber: Renstra Tabel 4.7 dan PK (2024–2025), SK Metodologi, tabel IKU Tw I–III.

Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Keuangan Kumulatif terhadap Pagu PK

Posisi	Realisasi Kumulatif	% thd Pagu PK (Rp65.534.457.578)	% thd Pagu Renja (Rp128.635.240.462)	Perubahan thd Posisi Sebelumnya
1	2	3	4	5
Triwulan I (Renja)	Rp6.604.828.784	10,08%	5,13%	–
s.d. Triwulan II (Renja)	Rp25.700.308.784	39,22%	19,98%	+29,14 poin
s.d. Triwulan III (LS, sementara)	Rp45.007.219.395	68,68%	34,99%	+29,46 poin (selisih basis sumber)

Sumber: Renja (Tw I–II) dan LS (Tw III). Perpindahan sumber dari Renja ke LS menyebabkan perbandingan antarposisi tidak sepenuhnya setara (V3).

Serapan kumulatif naik dari 10,08% ke 39,22% dan 68,68% terhadap pagu PK. Namun terhadap pagu Renja serapan hanya 34,99%, sehingga simpangan perencanaan masih menutupi tingkat serapan sebenarnya. Perbandingan Triwulan II ke Triwulan III perlu hati-hati karena sumbernya berbeda dan LS dibuat pada Oktober.

III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Rumus: Selisih = Realisasi − Target akhir; Persentase = Realisasi ÷ Target akhir × 100%; Sisa capaian = Target akhir − Realisasi bila positif. Aturan risiko: (a)

Rendah bila realisasi ≥95% target 2026 dan kesenjangan ke 2030 ≤5%; (b) Sedang bila ≥95% dan kesenjangan >5% sampai 15%; (c) Tinggi bila <95% target 2026 atau kesenjangan >15%; (d) naik satu tingkat bila kenaikan tahunan dibutuhkan melebihi rata-rata kenaikan jalur target; (e) Kritis bila tidak berpagu atau tanpa data.



Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Terakhir dengan Target Akhir Renstra (2030)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Outcome	Realisasi Terakhir	Target Akhir Renstra 2030	Selisih thd Target Akhir	% thd Target Akhir	Sisa Capaian	Status Pencapaian	Tingkat Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	T.1 Akses Infrastruktur Berkualitas	IKLI	65,70	64,76	+0,94	101,45%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Terlampaui; risiko pada validitas basis hitung.
2	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Berbobot (seri SK)	61,89	74,28	−12,39	83,32%	12,39	Belum tercapai	Tinggi	Kesenjangan 16,7% target; kebutuhan 3,10 poin/tahun melampaui jalur SK 2,74/tahun.
3	S.1.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100	100	0,00	100%	0,00	Tercapai	Rendah	Pemeliharaan capaian; RTRW/RDTR menunggu lintas sektor.
4	S.1.3 Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi SAKIP	72	80,12	−8,12	89,87%	8,12	Belum tercapai	Tinggi	Kebutuhan 2,03 poin/tahun melampaui jalur 1,77; target 2026 belum terpenuhi.
5	Program Penunjang	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (%)	50,00	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Sedang	Kemajuan 50% (Tw II); target Tw belum ada.
6	Program SDA	Persentase Kondisi Irigasi Kab/Kota (%)	89,53	100,00	-10,47	89,53%	10,47	Belum tercapai	Sedang	Gap 10,47 poin; kondisi turun 5,59 dari 2025; kebutuhan 2,62/tahun vs jalur 2,83.
7	Program SPAM	Ketahanan Air – RT akses air minum layak (%)	97,09	98,93	-1,84	98,14%	1,84	Belum tercapai	Rendah	Gap 1,84 poin; sama dengan 2025.
8	Program SPAM	RT akses air minum SPAM perpipaan/non-perpipaan terlindungi (%)	80,59	84,24	-3,65	95,67%	3,65	Belum tercapai	Rendah	Gap 3,65 poin; sama dengan 2025.
9	Program Air Limbah	RT akses air limbah domestik aman (%)	88,18	91,93	-3,75	95,92%	3,75	Belum tercapai	Rendah	Gap 3,75 poin; sama dengan 2025.
10	Program Air Limbah	RT akses sanitasi aman (%)	3,33	12,52	-9,19	26,60%	9,19	Belum tercapai	Tinggi	74,50% target 2026; kebutuhan 2,30/tahun vs jalur 2,01.
11	Program Drainase	Cakupan Drainase kondisi baik (%)	Tidak ada data	23,15	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Kritis	Program tidak beranggaran 2026 (PK); tanpa data.
12	Program Permukiman	Cakupan Infrastruktur Permukiman kondisi baik (%)	Tidak ada data	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Kritis	Program tidak beranggaran 2026 (PK); tanpa data.
13	Program Gedung	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	284,75	435,17	-150,42	65,43%	150,42	Belum tercapai	Tinggi	76,00% target 2026; kebutuhan 37,60/tahun vs jalur 15,12. Di luar kendali langsung (PK).
14	Program Gedung	Kepatuhan PBG dan SLF (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Capaian 100%; loncatan dari 85,91 (2025) perlu verifikasi.
15	Program Gedung	Fasilitas pemda ber-EBT (%)	0,70	6,26	-5,56	11,18%	5,56	Belum tercapai	Tinggi	46,36% target 2026; kebutuhan 1,39/tahun vs jalur 1,19. Di luar kendali langsung (PK).
16	Program Gedung	Bangunan Gedung kondisi baik (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Rendah	Pemeliharaan capaian 100%.
17	Program Penataan B&L	Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100,00	100,00	+0,00	100,00%	0,00	Tercapai (sementara)	Sedang	Capaian 100% tetapi program tidak beranggaran 2026 (PK).
18	Program Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	76,87	81,17	-4,30	94,71%	4,30	Belum tercapai	Sedang	Gap 4,30 poin (5,3%); serapan Jalan 68,04% dan fisik 70% (LS) belum tercermin pada nilai.
19	Program Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	Tidak ada data	25,25	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Tinggi	Tanpa data; target 2026 (21,57) di atas realisasi 2025 (20,90).
20	Program Penataan Ruang	Penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (%)	50,00	100,00	n/a	n/a	n/a	Belum dapat dinilai	Sedang	Kemajuan 50% (Tw II); Monev Tw III: target kasus terlampaui.

Sumber: tabel IKU Tw III; SK Metodologi; PK dan Renstra; Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (outcome: nilai terakhir Tw II). Baris 1–4 IKU; baris 5–20 outcome program.

Analisis. (1) Jarak: Indeks Infrastruktur dan SAKIP masih 12,39 dan 8,12 poin di bawah target 2030. (2) Tren: dua titik historis belum cukup. (3) Sisa waktu empat tahun (2027–2030). (4) Kenaikan dibutuhkan 3,10 dan 2,03 poin per tahun. (5) Kelayakan: kemajuan fisik 70–100% pada LS belum tercermin pada indeks, sehingga kelayakan pencapaian bergantung pada pembaruan data komponen. (6) Risiko: Indeks Infrastruktur, SAKIP, dan sanitasi aman Tinggi. (7) Implikasi: Renja 2027 perlu menetapkan seri target tunggal dan menautkan paket dengan komponen indeks. Pada IKLI dan Kesesuaian, strategi diarahkan mempertahankan capaian.

III.1.4 Analisis Proyeksi Pencapaian Indikator sampai Akhir Periode Renstra

Data historis hanya dua titik (2024–2025) ditambah tiga realisasi 2026 yang identik pada IKU, sehingga proyeksi numerik berbasis median atau rata-rata perubahan belum dapat dipertanggungjawabkan. Skenario konservatif: nilai tetap; moderat: kenaikan minimum per tahun agar tepat mencapai target 2030; optimistis tidak diangkakan. Ini perhitungan kebutuhan, bukan prediksi.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.7 Analisis Proyeksi Pencapaian Indikator sampai Akhir Periode Renstra

No.	Indikator	Realisasi Terakhir	Target Akhir Renstra	Sisa Capaian	Tren Historis	Skenario Konservatif	Skenario Moderat	Skenario Optimistis	Tingkat Risiko	Dasar Proyeksi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKLI	65,70	64,76	0,00	51,65 → 52,68 → 65,70 (Tw I–III)	Tetap di 65,70; target terpenuhi	Fokus mempertahankan	Tidak disajikan	Rendah	Aritmetika; validitas basis hitung
2	Indeks Infrastruktur (seri SK)	61,89	74,28	12,39	60,89 → 61,89 (Tw I–III)	Tetap di 61,89; kesenjangan 12,39	≥3,10/tahun; jalur SK 2,74/tahun	Tidak disajikan	Tinggi	Aritmetika dan jalur SK
3	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	0,00	100 → 100 (Tw I–III)	Tetap 100	Tetap 100	Tidak disajikan	Rendah	Target pemeliharaan
4	Nilai Implementasi SAKIP	72	80,12	8,12	66,84 → 72 → 72 (Tw I–III)	Tetap di 72; kesenjangan 8,12	≥2,03/tahun; jalur 1,77/tahun	Tidak disajikan	Tinggi	Aritmetika dan jalur Renstra
5	Tingkat Kemantapan Jalan (%) (nilai Tw II)	76,87	81,166	4,30	76,88 → 76,87	Tetap di 76,87; kesenjangan 4,30	≥1,07/tahun; jalur 1,10/tahun	Tidak disajikan	Sedang	Aritmetika; data Renja
6	Kondisi Irigasi (%) (nilai Tw II)	89,53	100	10,47	95,12 → 89,53	Tetap di 89,53; kesenjangan 10,47	≥2,62/tahun; jalur 2,83/tahun	Tidak disajikan	Sedang	Aritmetika; data Renja
7	RT akses sanitasi aman (%) (nilai Tw II)	3,33	12,52	9,19	3,10 → 3,19 → 3,33	Tetap di 3,33; kesenjangan 9,19	≥2,30/tahun; jalur 2,01/tahun	Tidak disajikan	Tinggi	Aritmetika; data Renja

Sumber: pengolahan penyusun dari SK Metodologi, Renstra, PK, tabel IKU Tw III, dan Cetakan Evaluasi RENJA SKPD.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tingkat risiko tidak berubah dari Triwulan II. Perubahan terpenting bukan pada nilai indikator, melainkan pada kondisi pelaksanaan: serapan 68,68% dan fisik tinggi pada LS belum diikuti pembaruan indikator. Jika nilai indeks tetap sampai akhir tahun walau fisik 70–100%, kesenjangan terhadap target 2026 akan tetap 1,44 poin (Indeks Infrastruktur) dan 1,04 poin (SAKIP).

III.1.5 Strategi Korektif terhadap Indikator yang Berisiko Tidak Mencapai Target

Strategi disusun untuk indikator berisiko Tinggi dan Kritis serta indikator Sedang yang bergantung pada anggaran besar. Penanggung jawab mengikuti PK 2026. Strategi tidak mengubah target; kalibrasi diajukan melalui reviu perencanaan. Karena Monev tidak mencatat status pelaksanaan tindak lanjut Triwulan II, strategi dirumuskan ulang berdasarkan kondisi Triwulan III dan difokuskan pada triwulan penutup.

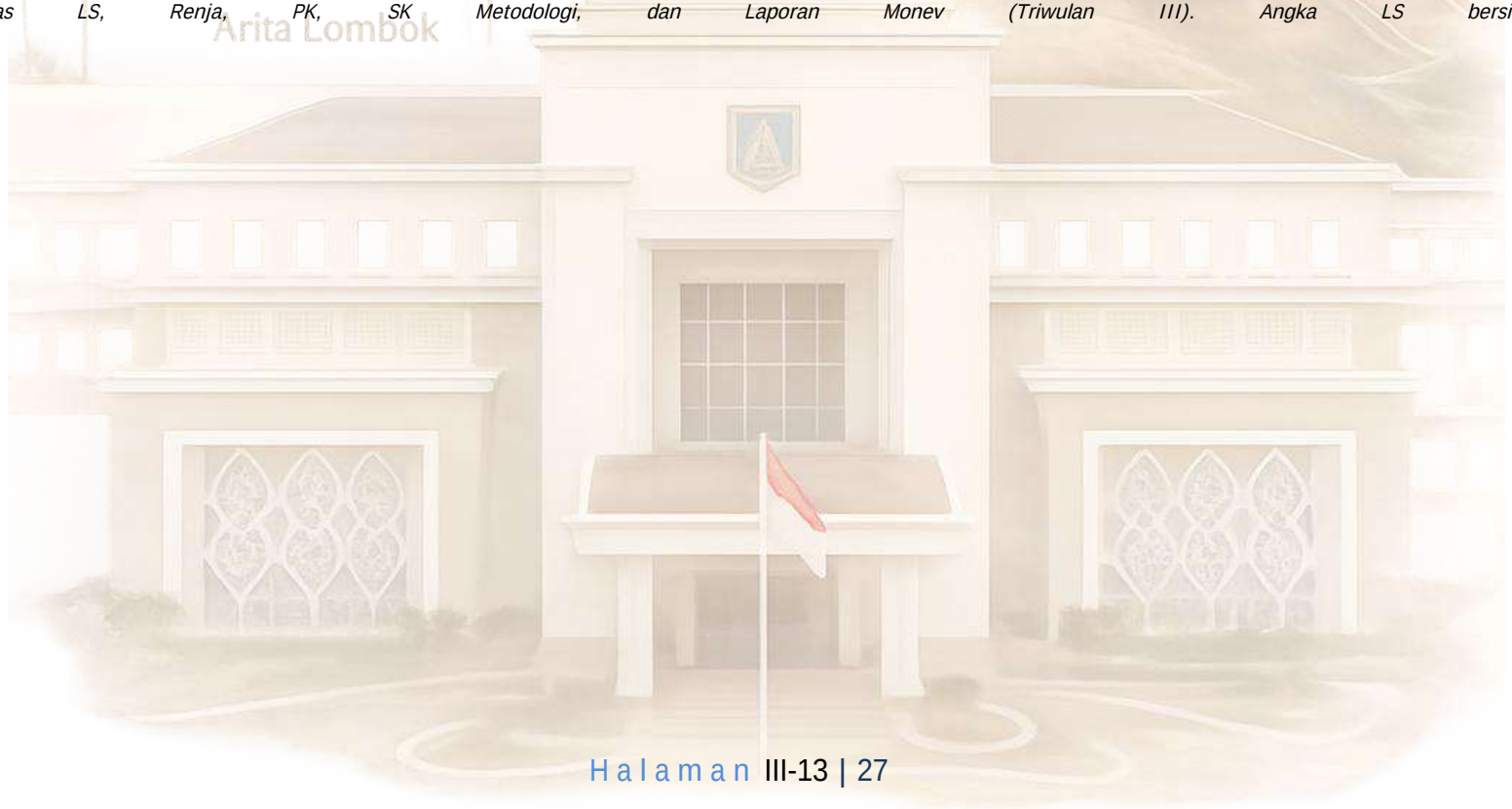
THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.8 Matriks Strategi Korektif Indikator Berisiko

No.	Indikator Berisiko	Kondisi Aktual	Target yang Belum Tercapai	Penyebab Utama	Strategi Korektif	Program/Kegiatan Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu	Keluaran	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pemantauan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Infrastruktur (seri SK)	61,89; tidak berubah tiga triwulan; fisik BM 80%, SDA 100%, CK 70% (LS)	Target 2026 63,33; sisa ke 2030: 12,39 poin	Nilai indeks tidak merespons kemajuan fisik; Konektivitas (±43% kenaikan rencana) tanpa pemilik data; nilai komponen tidak tersedia	Memperbarui nilai komponen dengan data paket yang selesai; menetapkan pemilik data tiap komponen; mengonfirmasi seri target	Jalan (1.03.10); Irigasi (1.03.02.2.02); SPAM; Air Limbah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Tw IV 2026 (pembaruan); Renja 2027	Nilai komponen terbaru; peta paket–komponen	Seluruh 7 komponen memiliki nilai dan pemilik data	Reviu triwulanan
2	Nilai Implementasi SAKIP	72; 98,58% target 2026	Target 2026 73,04; sisa ke 2030: 8,12 poin	Tidak berubah; ketepatan pelaporan belum optimal; matriks RTL tidak dapat diverifikasi (Monev)	PIC dan checklist pelaporan; verifikasi matriks RTL; menautkan target bidang pada IKU	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD (1.03.01.2.01)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Sekretaris Dinas	Tw IV 2026	Checklist; matriks RTL terverifikasi	Laporan tepat waktu; RTL berstatus jelas	Rapat monev bulanan
3	RT akses sanitasi aman (%)	3,33 (nilai Tw II); SPALD terserap 91,69% dengan fisik subkegiatan 11,50% (LS)	Target 2026 4,47; sisa ke 2030: 9,19 poin	Serapan SPALD jauh mendahului fisik; IPLT belum memiliki dokumen standar teknis dan uji baku mutu belum dilakukan; data L2T2 Tw III belum dilaporkan (Monev)	Merekonsiliasi progres fisik SPALD; menyusun dokumen standar teknis IPLT; melaporkan volume L2T2 bulanan	Pengelolaan Sistem Air Limbah (1.03.05.2.01); SPALD (...0023)	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.; UPT Air Limbah	Tw IV 2026; Renja 2027	Berita acara progres; dokumen standar teknis; laporan L2T2	SPALD sesuai progres terbayar; volume L2T2 terlaporkan	Laporan bulanan UPT
4	Kemantapan Jalan	76,87 (nilai Tw II); serapan Jalan 68,04%, fisik 70%	Sisa ke 2030: 4,30 poin	6 paket jembatan belum selesai (batas kontrak 20 atau 28 Oktober); 5 paket belanja modal menunggu produksi aspal; pelaksana mengerjakan banyak paket bersamaan; 5 dari 18 ruas rusak berat	Konfirmasi batas kontrak; jadwal kerja per paket; koordinasi produksi aspal; penanganan ruas rusak berat; uji mutu material	Rekonstruksi Jalan (...0059); Penggantian Jembatan (...0057); Pemeliharaan Rutin (...0051)	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Oktober–Desember 2026	Jadwal per paket; uji mutu; laporan progres	6 paket jembatan dan 5 paket aspal selesai dalam tahun anggaran	Monitoring fisik mingguan
5	Kondisi Irigasi (%)	89,53 (nilai Tw II); SDA serapan 88,52%, fisik 100%	Sisa ke 2030: 10,47 poin	OP irigasi baru 6,85% (saldo Rp214,8 juta); 3 pekerjaan melewati batas 25 September tanpa status; swakelola Rp210 juta dialihkan ke Perubahan	Konfirmasi status 3 pekerjaan; menjadwalkan OP; keputusan teknis swakelola sebelum Perubahan	Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (1.03.02.2.02)	Kepala Bidang SDA, Munawardi, S.T., M.T.	Oktober–Desember 2026	Status kontrak; jadwal OP	OP 26,4 km; status 3 pekerjaan jelas	Laporan bulanan
6	Akses air minum (SPAM)	Nilai Tw II 97,09 dan 80,59; SPAM	Gap 1,84 dan 3,65 poin ke	SPAM Mandalika baru 10% (±600 SR, 3 desa);	Evaluasi progres Mandalika; percepat pemasangan SR;	Perluasan SPAM (1.03.03.2.01.0032)	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi	Oktober–Desember 2026	Progres Mandalika; dokumen RISPAM	Pemasangan SR sesuai jadwal; RISPAM	Rapat khusus RISPAM–RC

No.	Indikator Berisiko	Kondisi Aktual	Target yang Belum Tercapai	Penyebab Utama	Strategi Korektif	Program/Kegiatan Pendukung	Penanggung Jawab	Waktu	Keluaran	Indikator Keberhasilan	Mekanisme Pemantauan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		serapan 20,75%, fisik 30%	2030	program penunjang 5 paket 65%; RISPAM dan DAK belum dikonfirmasi	konfirmasi status RISPAM dan pelaporan DAK		Saputra, S.T., M.T.			terkonfirmasi	
7	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (keberlanjutan)	100%; RTRW terserap 72,39% tanpa penetapan	Target 2030 100%	RTRW menunggu lintas sektor; RDTR menunggu RTRW; 38 dari 245 permohonan dikembalikan	Dokumen pendukung pembahasan; standar kelengkapan permohonan; evaluasi penyebab pengembalian	Penetapan RTRW (...0011); KKPR (...2.03.0004)	Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.	Triwulan IV 2026	Risalah pembahasan; standar dokumen	Pengembalian permohonan menurun	Pemantauan bulanan
8	Drainase dan Permukiman	Tidak ada data; tidak beranggaran 2026 (PK)	Target 2026 21,46% dan 100%	Program tidak dianggarkan	Bahan Renja 2027 dengan target terkalibrasi	Program 1.03.06 dan 1.03.07	Perencanaan (Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Renja 2027	Usulan program dan target	Keputusan penganggaran	Reviu Renja

Sumber: berkas LS, Renja, PK, SK Metodologi, dan Laporan Monev (Triwulan III). Angka LS bersifat sementara.



Dapat dilaksanakan pada 2026: nomor 1–7. Diteruskan ke Renstra berikutnya: komponen Konektivitas pada Indeks Infrastruktur, target sanitasi aman, dan kalibrasi target Drainase dan Permukiman.

III.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dinilai dari hubungan sumber daya dengan keluaran dan kontribusi terhadap indikator. Serapan tinggi tidak otomatis efektif, serapan rendah tidak otomatis efisien, dan sisa anggaran belum dapat disebut penghematan sebelum penyebabnya diverifikasi. Pada Triwulan III tersedia data fisik tingkat program dari berkas LS, sehingga deviasi fisik–keuangan dapat dihitung langsung (tidak lagi memakai indeks keluaran seperti pada Triwulan II).

III.1.6.1 Analisis Efisiensi Anggaran

Rumus: % realisasi keuangan = Realisasi ÷ Pagu × 100% (terhadap pagu PK dan pagu Renja). Deviasi fisik–keuangan = % fisik − % keuangan, dengan fisik menurut LS pada tingkat program. Target fisik adalah 100% pada akhir tahun; target triwulanan belum ditetapkan.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Anggaran per Program sampai Triwulan III Tahun 2026 (Sementara)

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi s.d. Tw II (Renja)	Realisasi s.d. Tw III (LS)	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Fisik (LS)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang	Rp22.940.166.863	Rp16.806.747.468	Rp16.770.999.983	73,11%	51,00%	65%	−8,11	Gaji ASN 76,92%; pengadaan gedung kantor 66,29% (fisik subkegiatan 11,38%); evaluasi kinerja 96,91%	Tidak langsung	Serapan tinggi tidak otomatis efektif. LS Rp16,77 miliar lebih rendah daripada Renja Rp18,07 miliar (V3). Pengadaan gedung kantor terserap Rp2,41 miliar dengan fisik rendah.	Verifikasi dasar pembayaran pengadaan; rekonsiliasi LS–Renja
2	Program Pengelolaan SDA	Rp2.755.824.162	Rp1.086.059.900	Rp2.439.574.000	88,52%	61,05%	100%	+11,48	15 paket konstruksi selesai (Monev); rehabilitasi 98,84% dan peningkatan 95,89% terserap; OP irigasi 6,85%	Kondisi Irigasi; Indeks Infrastruktur	Fisik 100% dengan serapan 88,52%: pekerjaan kontrak tuntas dengan biaya di bawah pagu. Sisa Rp316 juta sebagian besar OP irigasi yang belum berjalan (Rp214,8 juta), sehingga belum dapat disebut penghematan.	Jadwalkan OP; konfirmasi 3 pekerjaan melewati 25 September
3	Program SPAM	Rp4.986.825.000	Rp154.915.000	Rp1.034.756.600	20,75%	14,19%	30%	+9,25	SPAM Pokir 9 paket 100%; SPAM Mandalika 10% (±600 SR, 3 desa) (Monev)	Akses air minum; Indeks Infrastruktur	Fisik mendahului pembayaran (kontrak berjalan, termin belum dibayar). Saldo Rp3,95 miliar adalah risiko penyelesaian tahun anggaran.	Percepat Mandalika; kawal kontrak
4	Program Air Limbah	Rp2.291.839.610	Rp514.317.000	Rp2.098.400.715	91,56%	91,56%	70%	−21,56	Sanitasi reguler 100% di 22 lokasi Pokir (Monev); SPALD terserap 91,69% dengan fisik subkegiatan 11,50%	Sanitasi aman; Indeks Infrastruktur	Serapan mendahului fisik: pembayaran melampaui progres terverifikasi, atau fisik belum dicatat (V4). Belum dapat dinilai efisien.	Rekonsiliasi progres SPALD; dokumen IPLT
5	Program Drainase; Permukiman; Penataan B&L	Rp0	Rp0	Rp0	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak ada	Drainase; Permukiman; Penataan B&L	Tidak beranggaran 2026 (PK).	Konfirmasi status
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp4.601.326.160	Rp3.837.048.250	Rp3.663.691.799	79,62%	20,40%	80%	+0,38	Penataan bangunan gedung 100% (Masjid Tandik 90% pada 7 September) (Monev); pemeliharaan gedung strategis 79,70% (fisik subkegiatan 17,41%)	Bangunan baik; PBG/SLF	Fisik dan keuangan seimbang pada tingkat program (deviasi +0,38). Fisik subkegiatan pemeliharaan 17,41% tidak sejalan (V4).	Rinci komponen belanja; rekonsiliasi
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp27.609.777.563	Rp3.152.873.500	Rp18.786.085.700	68,04%	29,42%	70%	+1,96	Pokir 92 paket PHO (Monev); Rekonstruksi 76,88% (fisik subkegiatan 45,16%); Jembatan 26,04% (fisik 0,00%;	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	Fisik dan keuangan seimbang pada tingkat program. Renja belum memuat realisasi ini (Rp3,15 miliar). Hasil terhadap Kemantapan	Kawal 6 paket jembatan dan 5 paket aspal

No.	Program	Pagu PK (Riil)	Realisasi s.d. Tw II (Renja)	Realisasi s.d. Tw III (LS)	% thd Pagu PK	% thd Pagu Renja	Fisik (LS)	Deviasi Fisik–Keuangan (poin)	Keluaran/Output	Kontribusi terhadap IKU	Hasil Analisis Efisiensi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Monev: 3 dari 7 selesai)		Jalan belum terukur.	
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp33.975.220	Rp4.713.000	Rp5.641.250	16,60%	16,60%	14%	−2,60	Pelatihan belum menghasilkan peserta pada Renja	Tenaga kerja konstruksi ahli	Serapan dan fisik rendah dan seimbang; nilai kecil.	Jadwalkan pelatihan
9	Program Penataan Ruang	Rp314.723.000	Rp143.634.666	Rp208.069.348	66,11%	66,11%	43%	−23,11	KKPR 256 layanan (85,33%); 4 kasus tertangani (Monev); RTRW belum ditetapkan	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Serapan mendahului fisik karena RTRW terserap 72,39% tanpa penetapan (menunggu lintas sektor). Layanan KKPR efisien (Rp33,3 juta untuk 85% target).	Percepat dokumen pendukung RTRW
	Total	Rp65.534.457.578	Rp25.700.308.784	Rp45.007.219.395	68,68 %	34,99 %	–	–	–	–	Sisa saldo Rp20.527.238.183 (31,32% pagu PK). Saldo kontrak per bidang Rp9,87 miliar.	–

Sumber: berkas LS DPUPR 2026 (realisasi, keuangan, fisik; sementara); Cetakan Evaluasi RENJA SKPD (Tw II); PK 2026 Rev.1 (pagu); Laporan Monev (keluaran). Fisik program dari LS; tidak tersedia pada total.

UIN MATARAM
Arita Lombok

Terhadap pagu PK, serapan mencapai 68,68% (Rp45,01 miliar) dan terhadap pagu Renja 34,99%. Tiga pola utama: (a) fisik dan keuangan seimbang pada Jalan, Gedung, dan Jasa Konstruksi (deviasi −2,60 sampai +1,96 poin); (b) fisik mendahului keuangan pada SDA (+11,48) dan SPAM (+9,25), yang wajar bila termin belum dibayar tetapi menambah beban pembayaran di triwulan penutup; (c) keuangan mendahului fisik pada Air Limbah (−21,56) dan Penataan Ruang (−23,11), yang memerlukan verifikasi progres karena berpotensi pembayaran melampaui hasil. Pola (c) tidak serta-merta berarti inefisiensi; bisa juga berarti fisik belum diperbarui.

III.1.6.2 Analisis Efisiensi sampai Tingkat Program dan Kegiatan Prioritas

Prioritas dipilih dari nilai pagu besar, kontribusi terhadap IKU, dan selisih fisik–keuangan. Berkas LS memuat pagu subkegiatan menurut PK, sehingga pembandingan dengan Renja dapat dilakukan langsung. Fisik subkegiatan ditampilkan sebagaimana tercantum dan tidak konsisten dengan fisik program (V4).

THE MANDALIKA
Arita Lombok

Tabel 3.10 Matriks Efisiensi Program/Kegiatan Prioritas sampai Triwulan III Tahun 2026 (Sementara)

Program/Kegiatan Prioritas	IKU yang Didukung	Pagu (PK/LS vs Renja)	Realisasi Keuangan (LS)	Progres Fisik	Keluaran	Penilaian Efisiensi	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Kinerja	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekonstruksi Jalan (1.03.10.2.01.0059)	Kemantapan Jalan; Indeks Infrastruktur	PK/LS Rp22.309.258.348 (Renja Rp58.177.783.000)	Rp17.150.752.300 (76,88% PK; 29,48% Renja)	Subkegiatan 45,16%; program Jalan 70%	Pokir 92 paket PHO (Monev)	Belum dapat dinilai; fisik subkegiatan tertinggal 31,72 poin dari keuangan	Pembayaran termin; Pokir terstandar selesai; kesiapan teknis (Monev Tw II)	Kemantapan Jalan belum terukur	Rekonsiliasi fisik; pemutakhiran Renja
Penggantian Jembatan (...0057)	Kemantapan Jalan	PK/LS Rp4.289.390.000 (Renja Rp4.668.790.000)	Rp1.117.018.300 (26,04%)	Fisik 0,00% (LS); Monev: 3 dari 7 paket selesai	3 dari 7 paket	Keluaran Monev dan LS tidak sejalan; 6 paket berisiko lewat batas kontrak	Batas kontrak 20 atau 28 Oktober; banyak paket bersamaan; masa tunggu beton	Risiko keterlambatan akhir tahun	Konfirmasi batas kontrak; jadwal per paket
Pemeliharaan Rutin Jalan (...0051)	Kemantapan Jalan	PK/LS Rp1.000.003.995 (= Renja)	Rp518.315.100 (51,83%)	Fisik 0,08%	5 dari 18 ruas tidak dapat dikerjakan	Serapan setengah dengan fisik hampir nol; belum efisien	Ruas rusak berat; material belum standar mutu (Monev)	Pemeliharaan tidak menahan penurunan mantap	Uji mutu material; penanganan 5 ruas
Pemeliharaan Gedung Strategis (1.03.08.2.01.0018)	Bangunan gedung baik	PK/LS Rp4.595.741.160 (Renja Rp17.955.873.160)	Rp3.662.577.299 (79,70%)	Subkegiatan 17,41%; program Gedung 80%	Penataan bangunan gedung 100% (Monev)	Seimbang di tingkat program; subkegiatan tertinggal	Masjid Tandik 90% (7 September)	Bangunan baik 100% dijaga	Rinci komponen belanja
Pengadaan Gedung Kantor (1.03.01.2.07.0009)	Penunjang	PK/LS Rp3.630.040.000 (Renja Rp11.559.662.888)	Rp2.406.458.600 (66,29%)	Subkegiatan 11,38%	Belum tercatat	Belanja mendahului fisik	Belum terdokumentasi	Tidak langsung	Verifikasi dasar pembayaran
Gaji dan Tunjangan ASN (1.03.01.2.02.0001)	Penunjang (SDM)	PK/LS Rp15.509.102.091 (Renja Rp15.499.887.051)	Rp11.930.310.701 (76,92%)	Tidak berlaku (0,00%)	500 orang/bulan (target PK 117)	Serapan mendekati 9/12 (75%) jika posisi akhir September; V1 dan V9	Posisi data belum pasti	Tidak langsung	Rincian per bulan; reviu target
Perluasan SPAM (1.03.03.2.01.0032)	Akses air minum; Indeks Infrastruktur	PK/LS Rp4.986.825.000 (Renja Rp7.286.825.000)	Rp1.034.756.600 (20,75%)	Subkegiatan 0,29%; program SPAM 30%	SPAM Pokir 9 paket 100%; Mandalika 10% (Monev)	Pekerjaan mendahului pembayaran; saldo Rp3,95 miliar	Mandalika ±600 SR di 3 desa baru 10%; RISPAM dan DAK (Monev Tw II)	Risiko target SR tidak tercapai	Percepat SR; kawal kontrak
Irigasi: Rehabilitasi (...0014), Peningkatan (...0008), OP (...0021)	Kondisi Irigasi	PK/LS Rp1.566.548.500; Rp885.427.000; Rp230.588.662 (Renja rehabilitasi Rp2.806.549.000)	Rp1.548.308.400 (98,84%); Rp849.062.200 (95,89%); Rp15.802.750 (6,85%)	63,62%; 20,24%; 0,00%; program SDA 100%	15 paket konstruksi selesai (Monev)	Rehabilitasi dan peningkatan tuntas sesuai kontrak; OP belum berjalan	3 pekerjaan lewat 25 September; swakelola dialihkan ke Perubahan (Monev)	Kondisi Irigasi belum terukur	Jadwal OP; status 3 pekerjaan
SPALD Berbasis Masyarakat (1.03.05.2.01.0023)	Sanitasi aman	PK/LS Rp2.280.980.000 (= Renja)	Rp2.091.506.250 (91,69%)	Subkegiatan 11,50%; program Air Limbah 70%	Sanitasi reguler 100% di 22 lokasi (Monev)	Keuangan jauh mendahului fisik subkegiatan; belum dapat dinilai efisien	Rekonsiliasi diperlukan; IPLT tanpa dokumen standar (Monev)	Risiko pada sanitasi aman	Rekonsiliasi progres
RTRW (...2.01.0011); KKPR (...2.03.0004); Audit Tata Ruang (...2.04.0006)	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Rp189.888.000; Rp62.000.000; Rp62.835.000	Rp137.469.348 (72,39%); Rp33.300.000 (53,71%); Rp37.300.000 (59,36%)	RTRW 0%; KKPR 0%; Audit 0%; program 43%	RTRW 0 Perda; KKPR 256 layanan (Renja); 4 kasus, 2 SP1, 4 SP2 (Monev)	KKPR efisien; RTRW belum dapat dinilai	Lintas sektor; 38 dari 245 permohonan dikembalikan (Monev)	Kesesuaian terjaga; RTRW tertunda	Percepat dokumen RTRW; standar permohonan

Sumber: berkas LS DPUPR 2026 (sementara); Cetakan Evaluasi RENJA SKPD; Laporan Monev (keterangan "Monev").

III.1.6.3 Analisis Faktor Penyebab Efisiensi dan Inefisiensi

Tabel 3.11 Faktor Penyebab dan Status Pembuktian (Triwulan III)

Faktor	Bukti dalam Sumber	Status
1	2	3
Pendorong: paket terstandar selesai	89 dari 92 paket pengadaan langsung, 92 paket Pokir PHO, 3 dari 7 jembatan, gedung 100%, sanitasi reguler 100% di 22 lokasi, SPAM Pokir 9 paket 100%, 15 paket SDA (Monev Tw III)	Terverifikasi (Monev); progres belum direkonsiliasi dengan LS
Pendorong: pengendalian ruang dan koordinasi	Kasus pelanggaran melampaui target 4 kasus (2 SP1, 4 SP2); 44 PKKPR dan 75 informasi ruang; rakor Taman Tastura mengarahkan kontribusi OPD	Terverifikasi (Monev Tw III)
Kapasitas pelaksana dan jadwal	Pelaksana mengerjakan beberapa paket bersamaan; 3 paket pengadaan langsung belum selesai; masa tunggu beton ±1 minggu	Terverifikasi (Monev Tw III)
Pasokan material	5 paket belanja modal menunggu produksi aspal; material pemeliharaan dari penyedia belum memenuhi standar mutu; 5 dari 18 ruas rusak berat	Terverifikasi (Monev Tw III)
Kontrak dan penganggaran	6 paket jembatan belum selesai (batas kontrak 20 atau 28 Oktober); 3 pekerjaan SDA lewat 25 September tanpa status; swakelola Rp210 juta (6 lokasi) dialihkan ke Perubahan; material Rp35 juta per lokasi tanpa upah	Terverifikasi (Monev Tw III)
Dokumen dan lintas sektor	RTRW menunggu lintas sektor; RDTR menunggu RTRW; insentif lahan sawah belum jelas; 38 dari 245 permohonan dikembalikan; IPLT tanpa dokumen standar teknis dan uji baku mutu	Terverifikasi (Monev Tw III)
Data dan pelaporan	Data L2T2 Tw III belum dilaporkan; matriks RTL tidak dapat diverifikasi; fisik subkegiatan tidak konsisten dengan fisik program; LS dan Renja berbeda	Fakta (selisih data); penyebab: hipotesis
Simpangan Renja terhadap PK	Pagu Renja 1,96 kali PK; subkegiatan Rekonstruksi Jalan 2,6 kali, Gedung Strategis 3,9 kali	Fakta (data); penyebab: perlu konfirmasi

Perubahan harga dan produktivitas peralatan belum dapat dinilai karena tidak ada data.

III.1.6.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Analisis efisiensi SDM menilai kesesuaian jumlah pegawai, distribusi tugas, beban kerja, kompetensi, dan biaya pengembangan kapasitas dengan keluaran. Data jumlah pegawai per bidang, beban kerja, dan biaya pelatihan lengkap belum tersedia sehingga kecukupan SDM belum dapat dinilai. Data yang ada: pelatihan tenaga kerja konstruksi terserap Rp5.641.250 dari Rp33.975.220 (16,60%) dengan fisik 14% pada LS, sedangkan Renja belum memuat peserta pelatihan. Gaji dan Tunjangan ASN terserap Rp11,93 miliar (76,92%), dengan target keluaran PK (117 orang/bulan) yang belum dapat dibandingkan dengan realisasi 500 sebelum satuannya dipastikan. Monev juga mencatat pelaksana mengerjakan banyak paket bersamaan; hal ini menyangkut kapasitas penyedia, bukan pegawai DPUPR, sehingga tidak disimpulkan sebagai masalah SDM internal. Tindak lanjut: memvalidasi beban kerja pengawasan per paket dan menetapkan PIC pelaporan.

III.1.6.5 Analisis Efisiensi Teknologi Informasi

Data waktu penyusunan laporan, ketepatan input, koreksi data, dan biaya aplikasi belum tersedia sehingga penghematan sistem informasi tidak diklaim. Bukti

tidak langsung menunjukkan kebutuhan penguatan konsistensi data: LS dan Renja berbeda hingga Rp17,67 miliar, fisik subkegiatan tidak sejalan dengan fisik program, angka layanan ruang berbeda antarsumber, dan matriks RTL tidak dapat diverifikasi. Ukuran yang diusulkan: persentase kesesuaian data antarsumber, jumlah koreksi data per triwulan, ketepatan waktu input, dan jumlah deviasi fisik–keuangan yang teridentifikasi sebelum evaluasi akhir.

III.1.6.6 Analisis Efisiensi melalui Inovasi Pelayanan

Data waktu dan biaya sebelum–sesudah inovasi belum tersedia sehingga penghematan tidak dinyatakan. Secara kualitatif, layanan KKPR menghasilkan 256 layanan (Renja) dengan realisasi Rp33,3 juta (LS), dan pemanfaatan pilot L2T2 belum dilaporkan pada Triwulan III. Indikator yang diusulkan: waktu layanan KKPR, persentase layanan tepat waktu, persentase permohonan yang dikembalikan (saat ini 38 dari 245), serta volume dan pelanggan L2T2 per bulan.

III.1.6.7 Pemanfaatan Hasil Analisis Efisiensi untuk Perencanaan dan Penganggaran

Tabel 3.12 Simpangan Pagu Subkegiatan: Renja (Perencanaan) terhadap PK/LS (Ditetapkan)

No.	Subkegiatan	Pagu Renja	Pagu PK/LS	Selisih (Renja − PK)	Simpangan
1	2	3	4	5	6
1	Rekonstruksi Jalan	Rp58.177.783.000	Rp22.309.258.348	Rp35.868.524.652	160,78%
2	Pemeliharaan Gedung Strategis	Rp17.955.873.160	Rp4.595.741.160	Rp13.360.132.000	290,71%
3	Pengadaan Gedung Kantor	Rp11.559.662.888	Rp3.630.040.000	Rp7.929.622.888	218,44%
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp7.286.825.000	Rp4.986.825.000	Rp2.300.000.000	46,12%
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rp2.806.549.000	Rp1.566.548.500	Rp1.240.000.500	79,15%
6	Penggantian Jembatan	Rp4.668.790.000	Rp4.289.390.000	Rp379.400.000	8,85%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp15.499.887.051	Rp15.509.102.091	−Rp9.215.040	-0,06%
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp1.000.004.000	Rp1.000.003.995	Rp5	0,00%
9	SPALD Berbasis Masyarakat	Rp2.280.980.000	Rp2.280.980.000	Rp0	0,00%

Sumber: Cetakan Evaluasi RENJA SKPD dan berkas LS DPUPR 2026 (pagu subkegiatan sama dengan PK). Simpangan = (Renja − PK) ÷ PK.

Simpangan terbesar terdapat pada Rekonstruksi Jalan (+Rp35,87 miliar), Pemeliharaan Gedung Strategis (+Rp13,36 miliar), dan Pengadaan Gedung Kantor (+Rp7,93 miliar). Pada subkegiatan lain Renja sama atau mendekati PK. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan Renja terkonsentrasi pada belanja modal besar, dan target keluaran Renja pada subkegiatan tersebut (mis. 16 km rekonstruksi) perlu dikalibrasi terhadap pagu yang ditetapkan.

Tabel 3.13 Pemanfaatan Hasil Analisis Efisiensi untuk Renja dan RKA

No.	Temuan Efisiensi/Inefisiensi	Program/Kegiatan Terkait	Implikasi terhadap IKU	Tindakan Perbaikan	Usulan Perencanaan Tahun Berikutnya	Implikasi Anggaran	Penanggung Jawab	Waktu Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renja melampaui pagu yang ditetapkan pada belanja modal besar	Rekonstruksi Jalan; Gedung Strategis; Gedung Kantor; SPAM; Irigasi	Target keluaran Renja tidak realistis terhadap pagu	Rekonsiliasi pagu Renja–PK; kalibrasi target keluaran	Renja disusun dari plafon dan target keluaran sebanding dengan pagu	Penyelarasan	Perencanaan (Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.)	Tw IV 2026; Renja 2027
2	Fisik subkegiatan, program, dan Monev tidak konsisten	Jalan; Air Limbah; Gedung	Penilaian kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	Penyeragaman metode fisik dan sumber data	Satu sumber realisasi terpadu dengan pembobotan fisik tertulis	Tidak ada	Perencanaan; Sekretaris Dinas	Tw IV 2026
3	Keuangan mendahului fisik (Air Limbah, Penataan Ruang)	SPALD; RTRW	Risiko pembayaran melampaui hasil	Verifikasi progres sebelum pembayaran berikutnya	Pembayaran berbasis progres terverifikasi	Tidak ada	Bidang Cipta Karya; Penataan Ruang	Tw IV 2026
4	Fisik mendahului keuangan (SDA, SPAM): beban akhir tahun	SPAM; SDA; Jalan	Risiko tidak terbayar dalam tahun anggaran	Jadwal pembayaran dan pencairan termin	Kalender kontrak dan pembayaran sejak awal tahun	Saldo Rp9,87 miliar perlu penjadwalan	Bina Marga; Cipta Karya; SDA	Oktober–Desember 2026
5	Kesiapan teknis dan pasokan material	Jembatan; aspal; ruas rusak berat	Kemantapan Jalan	Konfirmasi kontrak; koordinasi aspal; uji mutu	Kalender pengadaan memperhitungkan aspal dan masa tunggu beton; standar mutu material	Dana survei dan uji tanah dalam plafon	Sekretaris Dinas (PJ Bina Marga)	Renja 2027
6	Komponen Konektivitas tidak memiliki pemilik data	Indeks Infrastruktur	Komponen pengaruh terbesar (±43%)	Menetapkan pemilik data	Indikator/kegiatan komponen pada PK dan Renja	Usulan bersyarat; belum disetujui	Perencanaan; Sekretaris Dinas	Renja 2027
7	Sisa OP irigasi dan swakelola dialihkan ke Perubahan	Irigasi	Kondisi Irigasi	Jadwal OP; keputusan teknis swakelola	Mekanisme swakelola dengan standar teknis dan anggaran upah	Dalam plafon SDA	Bidang SDA	Renja 2027

Seluruh implikasi anggaran adalah usulan analisis, bukan keputusan yang telah disetujui.

III.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pemetaan memakai berkas LS untuk realisasi Triwulan III, PK untuk tujuan, sasaran, dan target, Renja untuk indikator keluaran, dan Monev untuk faktor pelaksanaan. Kontribusi terhadap indikator dinyatakan potensial; kesamaan waktu tidak dijadikan bukti sebab-akibat.



Tabel 3.14 Matriks Kontribusi Program/Kegiatan terhadap IKU

No.	Tujuan/Sasaran	IKU yang Didukung	Program	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target (2026)	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan s.d. Tw III	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendorong/Penghambat	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur; Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi; Jembatan; Pemeliharaan Rutin	Km/m jalan dan jembatan	16 km; 150 m; 10 km (Renja)	70% (LS); BM 80%	Rp18.786.085.700 (68,04% PK)	Potensial; indeks dan Kemantapan Jalan belum terukur	Pendorong: 92 paket Pokir PHO; Penghambat: 6 paket jembatan, aspal, ruas rusak berat	Kawal kontrak; rekonsiliasi
2	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur; Kondisi Irigasi	Pengelolaan SDA	Rehabilitasi; Peningkatan; OP	Km jaringan	28,5; 31,67; 26,4 km	100% (LS)	Rp2.439.574.000 (88,52% PK)	Potensial; Kondisi Irigasi belum terukur	Pendorong: 15 paket selesai; Penghambat: OP, 3 pekerjaan lewat batas	Jadwal OP
3	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Air Minum 0,27)	SPAM	Perluasan SPAM	Sambungan Rumah	1.000 SR	30% (LS)	Rp1.034.756.600 (20,75% PK)	Potensial; SR belum tercatat pada Renja	Pendorong: SPAM Pokir 100%; Penghambat: Mandalika 10%	Percepat SR
4	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (Sanitasi 0,22); sanitasi aman	Air Limbah	SPALD; sedot lumpur tinja; IPLT	m³/hari; RT	100 m³/hari; 1.000 RT	70% (LS)	Rp2.098.400.715 (91,56% PK)	Parsial; keuangan mendahului fisik	Pendorong: sanitasi reguler 22 lokasi; Penghambat: IPLT, L2T2	Rekonsiliasi
5	S.1.1 Kualitas Infrastruktur	Bangunan baik; PBG/SLF	Penataan Bangunan Gedung	Pemeliharaan Gedung Strategis; PBG/SLF	Bangunan; dokumen	1 bangunan; 120 dokumen	80% (LS)	Rp3.663.691.799 (79,62% PK)	Parsial; gedung 100% (Monev)	Pendorong: layanan PBG dan penataan gedung	Rinci belanja
6	S.1.2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	RTRW; KKPR; Pengendalian	Layanan; dokumen; kasus	300 layanan; 1 Perda; 2 kasus	43% (LS)	Rp208.069.348 (66,11% PK)	Mendukung: KKPR 256 layanan (85%), kasus tertangani	Penghambat: lintas sektor; 38 permohonan dikembalikan	Standar permohonan
7	T.1 Akses Infrastruktur Berkualitas	Tenaga kerja konstruksi ahli	Jasa Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja	Orang dilatih	50 orang	14% (LS)	Rp5.641.250 (16,60% PK)	Belum ada keluaran pada Renja	Belum terdokumentasi	Jadwalkan pelatihan
8	S.1.3 Akuntabilitas Kinerja	SAKIP; Pencapaian IKU PD	Penunjang	Perencanaan; Evaluasi Kinerja; Administrasi	Dokumen/laporan	Beragam	65% (LS)	Rp16.770.999.983 (73,11% PK)	Mendukung operasional; kontribusi SAKIP belum terbukti	Penghambat: pelaporan, RTL tidak terverifikasi	PIC dan checklist
9	S.1.1 (Drainase, Permukiman, Penataan B&L)	Drainase; Permukiman; Penataan B&L	Tiga program	–	–	–	n/a	Rp0	Tidak terdukung anggaran 2026	Fakta PK	Reviu penganggaran
10	S.1.1 (Konektivitas, Internet, Listrik)	Indeks Infrastruktur	Tidak ada pada PK	–	–	–	n/a	n/a	Tidak teridentifikasi	Pengaruh terbesar kenaikan rencana (±43%)	Tetapkan pemilik data

Sumber: berkas LS DPUPR 2026 (sementara); Cetakan Evaluasi RENJA SKPD; PK 2026; SK Metodologi; Laporan Monev.

1. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Paket Pokir terstandar (92 paket PHO), SDA (15 paket selesai, fisik 100%), penataan bangunan gedung (100%), sanitasi reguler dan SPAM Pokir, serta layanan KKPR dan pengendalian ruang. Kontribusinya terhadap indikator hasil belum dapat diukur karena nilai IKU dan outcome Triwulan III tidak berubah atau belum dilaporkan.

2. Program/kegiatan yang belum memberikan kontribusi optimal. SPAM Mandalika (10%), pelatihan konstruksi, RTRW, serta SPALD dan pemeliharaan gedung yang serapannya tinggi tetapi fisik subkegiatan rendah. OP irigasi baru 6,85%.

3. Program/kegiatan yang berisiko menghambat target akhir Renstra. Enam paket jembatan dan lima paket aspal yang berisiko tidak selesai dalam tahun anggaran, SPAM Mandalika, OP irigasi, RTRW/RDTR, serta IPLT dan L2T2. Komponen Konektivitas tidak memiliki program pada PK.

4. Keterkaitan dengan strategi korektif. Rekomendasi sejalan dengan Tabel 3.8 dan 3.9: Indeks Infrastruktur, SAKIP, dan sanitasi aman (Tinggi) serta Drainase dan Permukiman (Kritis) menjadi prioritas.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

III.2 ANALISIS KETERPADUAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kinerja. Keempat IKU tidak berubah selama tiga triwulan. IKLI dan Kesesuaian sudah di atas atau pada target 2030, sedangkan Indeks Infrastruktur (83,32%) dan SAKIP (89,87%) tertinggal. Indikator outcome Triwulan III belum dilaporkan.

Pelaksanaan. Fisik tinggi pada SDA (100%), Bina Marga (80%), dan Gedung (80%), serta Cipta Karya 70%, sementara SPAM 30% dan Penataan Ruang 43%. Enam paket jembatan dan lima paket aspal masih berisiko melewati batas kontrak.

Anggaran dan sumber daya. Serapan sementara 68,68% dari pagu PK dan 34,99% dari pagu Renja; 88,0% anggaran paket telah dikontrakkan dan 75,3% nilai kontrak telah dibayar. Saldo kontrak Rp9,87 miliar dan sisa anggaran Rp20,53 miliar perlu dijadwalkan agar tidak menumpuk di akhir tahun. Pola keuangan mendahului fisik terjadi pada Air Limbah dan Penataan Ruang. Efisiensi SDM, TI, dan inovasi belum dapat dinilai.

Keberlanjutan. Indikator baik yang perlu penguatan: IKLI (validitas data) dan Kesesuaian (RTRW). Indikator yang tertinggal meskipun anggaran terserap: Indeks Infrastruktur dan sanitasi aman. Kegiatan berpagu yang belum terealisasi dan berpotensi menghambat: SPAM (saldo Rp3,95 miliar), Jalan (saldo Rp8,82 miliar),

dan OP irigasi. Peluang meningkatkan keluaran tanpa tambahan sumber daya: KKPR dan L2T2. Kebutuhan perbaikan: sumber data realisasi terpadu, metode fisik yang konsisten, pembaruan indikator outcome, dan target triwulanan. Efisiensi tidak disamakan dengan pengurangan belanja.



III.3 RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN IV DAN PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA

Tabel 3.15 Matriks Rencana Tindak Lanjut

No.	Permasalahan/Temuan	Indikator atau Program Terkait	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Bukti Penyelesaian	Mekanisme Monitoring	Implikasi terhadap Renja/RKA Tahun Berikutnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Posisi data LS belum jelas; LS dan Renja berbeda Rp17,67 miliar; fisik tidak konsisten	Seluruh program	Rekonsiliasi LS–Renja–SIPD dan penyeragaman metode fisik	Triwulan IV 2026 (segera)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Berita acara rekonsiliasi	Verifikasi bulanan	Satu sumber realisasi terpadu
2	6 paket jembatan dan 3 paket pengadaan langsung belum selesai; batas kontrak 20 atau 28 Oktober	Penggantian Jembatan; Rekonstruksi Jalan	Konfirmasi batas kontrak; jadwal kerja per paket; monitoring mingguan	Oktober 2026 (segera)	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Dokumen kontrak; laporan mingguan	Monitoring mingguan	Persyaratan kapasitas penyedia
3	5 paket belanja modal menunggu aspal; 5 ruas rusak berat; material belum standar	Jalan	Koordinasi produksi aspal; penanganan ruas rusak berat; uji mutu	Oktober–Desember 2026	Sekretaris Dinas (selaku PJ Bina Marga), Muhamad Sarjan, S.T., M.T.	Jadwal produksi; hasil uji	Laporan bulanan	Kalender pengadaan; standar material
4	3 pekerjaan SDA lewat batas 25 September; OP irigasi 6,85%; swakelola Rp210 juta dialihkan	Irigasi	Konfirmasi status; jadwal OP; keputusan teknis swakelola sebelum Perubahan	Oktober 2026 (segera); Perubahan	Kepala Bidang SDA, Munawardi, S.T., M.T.	Status kontrak; jadwal OP	Laporan bulanan	Mekanisme swakelola dan anggaran upah
5	SPAM Mandalika 10%; saldo SPAM Rp3,95 miliar; RISPAM dan DAK belum terkonfirmasi	SPAM	Percepat pemasangan SR; konfirmasi RISPAM dan pelaporan DAK	Oktober–Desember 2026	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.	Progres SR; dokumen RISPAM	Rapat khusus	Jadwal kontrak SPAM
6	Keuangan mendahului fisik (SPALD, RTRW); IPLT tanpa dokumen standar	Air Limbah; Penataan Ruang	Verifikasi progres sebelum pembayaran; dokumen standar teknis IPLT dan uji baku mutu	Triwulan IV 2026	Kepala Bidang Cipta Karya, Iqbal Prayadi Saputra, S.T., M.T.; Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.	Berita acara progres; dokumen IPLT	Verifikasi keuangan	Dokumen IPLT pada Renja 2027
7	RTRW/RDTR menunggu lintas sektor; 38 dari 245 permohonan dikembalikan	Penataan Ruang	Dokumen pendukung; standar kelengkapan permohonan	Perlu koordinasi/keputusan pihak di luar DPUPR	Kepala Bidang Penataan Ruang, Lalu Rudy Hermawan, S.T., M.P.W.K.	Risalah pembahasan	Pemantauan bulanan	Urutan RTRW–RDTR
8	Indikator outcome Tw III belum dilaporkan; nilai indeks tidak berubah	IKU dan outcome	Melengkapi nilai outcome dan komponen indeks	Triwulan IV 2026	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Nilai indikator terbaru	Reviu triwulanan	Pembaruan indikator tiap triwulan
9	Simpangan Renja terhadap PK; target 2026 yang perlu direviu	Seluruh program	Rekonsiliasi pagu; kalibrasi target keluaran	Renja 2027 (perencanaan tahun berikutnya)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.; Bappeda	Berita acara	Reviu Renja	Renja disusun dari plafon riil
10	Matriks RTL tidak dapat diverifikasi	Monev	Verifikasi ulang matriks; status tindak lanjut 4 Agustus	Triwulan IV 2026	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Zulkarnain Hakim, S.E., M.Ak.	Matriks terverifikasi	Monitoring berjenjang	Early warning pada Renja 2027

Penanggung jawab mengikuti PK 2026; tenggat resmi ditetapkan pimpinan.

III.4 PENUTUP DAN DATA YANG BELUM TERSEDIA

Pada Triwulan III, keempat IKU tetap sama dengan Triwulan I dan II, sedangkan serapan sementara mencapai 68,68% dari pagu PK dengan fisik 70–100% pada sebagian besar bidang. Persoalan utama bukan hanya kecepatan pelaksanaan, melainkan keterkaitan antara kemajuan fisik, nilai indikator, dan konsistensi data (LS, Renja, dan Monev). Enam paket jembatan, lima paket aspal, SPAM Mandalika, dan OP irigasi menjadi perhatian pada triwulan penutup.

Seluruh angka Triwulan III bersifat sementara. Data yang belum tersedia: tanggal posisi data LS, realisasi Triwulan III pada Renja yang lengkap, indikator outcome Triwulan III, nilai komponen IKLI dan Indeks Infrastruktur, target triwulanan fisik dan keuangan per paket, dokumen kontrak, serta data SDM, TI, dan inovasi layanan 2026. Laporan dapat diperbarui setelah data tersebut tersedia.

THE MANDALIKA
Arita Lombok

BAB IV
PENUTUP



IV.1 SIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Bab III (data sementara), dapat disimpulkan bahwa keempat Indikator Kinerja Utama berada pada kategori Sangat Tinggi menurut skala Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024, tetapi nilai indikator belum merekam kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan. Capaian tersebut perlu dibaca bersama kondisi data dan pelaksanaan berikut.

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mencapai 65,70 terhadap target 2026 sebesar 53,91 (121,87%) dan telah melampaui target akhir Renstra 2030 (64,76). Nilai ini sama dengan Triwulan I dan II sehingga basis perhitungannya perlu dipastikan.
2. Indeks Infrastruktur (basis SK Metodologi) mencapai 61,89 terhadap target 63,33 (97,73%), kurang 1,44 poin dari target 2026 dan baru 83,32% dari target akhir Renstra (74,28). Nilai tidak berubah selama tiga triwulan dan tingkat risikonya Tinggi.
3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang tetap 100% (capaian 100%). Layanan KKPR mencapai 256 dari target 300 (85,33%) dan pengendalian ruang melampaui target (4 kasus tertangani dari target 2 kasus; 2 SP1 dan 4 SP2), tetapi 38 dari 245 permohonan dikembalikan karena kelengkapan dokumen belum memenuhi standar.
4. Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah sebesar 72 terhadap target 73,04 (98,58%), kurang 1,04 poin, dan masih 8,12 poin di bawah target akhir Renstra 80,12 (89,87%) dengan tingkat risiko Tinggi.
5. Realisasi anggaran sementara mencapai Rp45,01 miliar, atau 68,68% dari pagu PK (Rp65,53 miliar) dan 34,99% dari pagu Renja (Rp128,64 miliar). Sebesar 88,0% anggaran paket telah dikontrakkan dan 75,3% nilai kontrak telah dibayarkan. Saldo kontrak Rp9,87 miliar (Bina Marga Rp7,36 miliar dan Cipta Karya Rp2,49 miliar) dan sisa anggaran Rp20,53 miliar perlu dijadwalkan agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

6. Kemajuan fisik tinggi pada Sumber Daya Air (100%), Bina Marga (80%), Penataan Bangunan Gedung (80%), dan Cipta Karya (70%), tetapi rendah pada SPAM (30%) dan Penataan Ruang (43%). Keuangan mendahului fisik pada Air Limbah (selisih −21,56 poin) dan Penataan Ruang (−23,11 poin) sehingga progres perlu diverifikasi sebelum pembayaran berikutnya.
7. Indikator outcome program Triwulan III belum dilaporkan pada Renja sehingga nilai terakhir (Triwulan II) dipertahankan. Indikator yang paling tertinggal terhadap target 2026 adalah fasilitas pemda berbasis EBT (46,36%), akses sanitasi aman (74,50%), dan konsumsi listrik per kapita (76,00%); sedangkan Drainase, Permukiman, dan tenaga kerja konstruksi ahli belum memiliki data.
8. Risiko jangka menengah terhadap target akhir Renstra 2030 berada pada tingkat Tinggi untuk Indeks Infrastruktur, SAKIP, sanitasi aman, konsumsi listrik, EBT, dan tenaga kerja konstruksi ahli, serta Kritis untuk Drainase dan Permukiman yang tidak beranggaran pada PK 2026 dan tidak memiliki data.

Secara keseluruhan, persoalan utama pada Triwulan III bukan semata-mata kecepatan pelaksanaan, melainkan keterkaitan antara kemajuan fisik, pembaruan nilai indikator, dan konsistensi data antara berkas LS, Renja, dan Monev. Seluruh angka Triwulan III bersifat sementara dan dapat berubah setelah rekonsiliasi data.

IV.2 SARAN/REKOMENDASI

1. Rekonsiliasi Data dan Penyeragaman Dasar Penilaian Kinerja
   - Merekonsiliasi realisasi antara berkas LS, Renja, dan SIPD serta menetapkan tanggal posisi data (selisih LS dan Renja Rp17,67 miliar).
   - Menyeragamkan metode pembobotan fisik subkegiatan, program, dan bidang, serta menetapkan target triwulanan fisik dan keuangan per paket.
   - Menyeragamkan seri target IKU antara PK 2026 Revisi 1, SK Metodologi, Renstra, dan RPJMD 2025–2029. Target PK untuk IKLI (52,68) dan Indeks Infrastruktur (60,89) berbeda dari target yang digunakan pada Bab III (53,91 dan 63,33); penetapan seri tunggal dan, bila diperlukan, revisi PK perlu diputuskan pimpinan.
   - Mematangkan SI PRAJA sebagai sumber realisasi terpadu yang menghubungkan PK, cascading indikator, realisasi fisik–keuangan, dan capaian indeks, termasuk integrasi indikator hingga level subkegiatan dan dashboard monitoring (penanggung jawab: Kasubag Perencanaan dan Keuangan).
2. Pembaruan Indikator Outcome dan Komponen Indeks

- Melengkapi nilai indikator outcome Triwulan III serta nilai komponen IKLI dan Indeks Infrastruktur berdasarkan paket yang telah selesai.
- Menetapkan pemilik data untuk setiap komponen indeks, terutama Konektivitas (±43% kenaikan rencana), Internet, dan Listrik yang belum memiliki indikator pada PK bidang.

3. Pengendalian Penyelesaian Paket Jalan dan Jembatan sampai Akhir Tahun Anggaran
   - Mengonfirmasi batas kontrak enam paket jembatan (20 atau 28 Oktober) dan melakukan monitoring fisik mingguan.
   - Mengoordinasikan produksi aspal untuk lima paket belanja modal, menangani lima dari 18 ruas rusak berat, dan menegakkan uji mutu material pemeliharaan.
   - Menyusun kalender pengadaan yang memperhitungkan produksi aspal dan masa tunggu beton pada Renja 2027 (penanggung jawab: Sekretaris Dinas selaku penanggung jawab Bidang Bina Marga).
4. Penguatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur
   - Menjadwalkan OP jaringan irigasi (realisasi baru 6,85%), mengonfirmasi status tiga pekerjaan yang melewati batas 25 September, dan memutuskan mekanisme swakelola Rp210 juta (6 lokasi) sebelum APBD Perubahan.
   - Menjaga alokasi OP irigasi dan pemeliharaan rutin jalan agar Kondisi Irigasi (turun dari 95,12 menjadi 89,53) dan Kemantapan Jalan tidak menurun.
5. Percepatan Layanan Air Minum dan Sanitasi
   - Mempercepat pemasangan sambungan rumah SPAM Mandalika (±600 SR di tiga desa; progres 10%) serta mengonfirmasi status RISPAM dan pelaporan DAK.
   - Memverifikasi progres fisik SPALD (serapan 91,69% dengan fisik subkegiatan 11,50%), menyusun dokumen standar teknis IPLT dan uji baku mutu, serta melaporkan volume L2T2 setiap bulan (penanggung jawab: Kepala Bidang Cipta Karya).
6. Percepatan Dokumen Tata Ruang dan Perbaikan Layanan KKPR
   - Mendorong pembahasan RTRW yang masih menunggu koordinasi lintas sektor, sebagai prasyarat RDTR, melalui dokumen pendukung dan risalah pembahasan.
   - Menetapkan standar kelengkapan permohonan dan mengevaluasi penyebab pengembalian 38 dari 245 permohonan (penanggung jawab: Kepala Bidang Penataan Ruang).
7. Penguatan Pemantauan Kinerja Berkualitas Antar Jenjang
   - Evaluasi berkala berbasis laporan kinerja internal per bidang.

- Rapat monitoring yang terdokumentasi dalam berita acara atau notula, termasuk verifikasi ulang matriks rencana tindak lanjut yang pada Monev Triwulan III tidak dapat diverifikasi.
- Penelusuran deviasi indikator hingga level aktivitas untuk memastikan akuntabilitas unit kerja.

8. Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2027
   - Menyusun Renja dari plafon riil dan mengalibrasi target keluaran terhadap pagu, mengingat pagu Renja 1,96 kali pagu PK dengan simpangan terbesar pada Rekonstruksi Jalan (Rp35,87 miliar).
   - Menyiapkan bahan penganggaran Drainase dan Permukiman yang tidak beranggaran pada 2026, serta indikator dan kegiatan komponen Konektivitas pada PK dan Renja.
9. Kelengkapan Laporan dan Lampiran sesuai Catatan Hasil Reviu Inspektorat
   - Melampirkan PK 2026 beserta perubahannya, Pengukuran Kinerja dalam format Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024, SK Tim Penyusun, SOP penyusunan laporan, dan bukti dukung data.
   - Melengkapi perbandingan realisasi dengan standar nasional dan provinsi serta menegaskan dasar pagu (APBD murni atau APBD Perubahan).

Dengan rekonsiliasi data, pembaruan indikator, dan pengendalian kontrak pada triwulan penutup, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mempertahankan indikator yang telah tercapai (IKLI dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) serta menutup kesenjangan pada Indeks Infrastruktur dan SAKIP. Rekomendasi di atas selaras dengan Matriks Strategi Korektif (Tabel 3.9) dan Matriks Rencana Tindak Lanjut (Tabel 3.16) pada Bab III.

THE MANDALIKA
Arita Lombok